



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

SEKRETARIAT KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berkewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang telah dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Sistematika penyusunan laporan ini telah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai salah satu dokumen SAKIP, Laporan Kinerja Tahun 2023 bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas/pertanggungjawaban atas kinerja hasil (outcome) dan keluaran (output) terhadap penggunaan anggaran Sekretariat Kemenko Marves selama Tahun 2023. Laporan kinerja tahunan merupakan bentuk evaluasi selama pelaksanaan program/kegiatan berlangsung (intermediate evaluation) dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Kemenko

Marves dalam memenuhi setiap sasaran program dan kegiatan sesuai dengan dokumen SAKIP yang telah disusun.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai perkembangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peningkatan kinerja organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan kedepannya.

Jakarta, Februari 2024
Plh. Sekretaris Kementerian Koordinator,



Odo R. M. Manuhutu

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja Tahun 2023 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Setmenko Marves) diukur berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Setmenko Marves selama periode Tahun 2023. Perencanaan Kinerja disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Setmenko yaitu membantu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang (Kemenko) Marves.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Setmenko Marves merupakan hasil reviu Renstra sesuai rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada hasil evaluasi SAKIP Kemenko Marves tahun 2020 dan 2021, dimana perlu dilakukan penajaman indikator kinerja utama (IKU) Kemenko Marves, karena rendahnya tingkat kendali Kemenko Marves terhadap beberapa IKU serta rendahnya kontinuitas ketersediaan beberapa data. Perubahan setelah reviu sebagai berikut:

1. Menggunakan logical framework yang sebelumnya menggunakan Balanced Score Card.
2. Jumlah Sasaran Strategis menjadi 10 SS dari 16 SS pada Renstra sebelumnya.
3. Jumlah IKU menjadi 9 IKU dari 16 IKU pada Renstra sebelumnya.

Capaian kinerja Setmenko Marves tahun 2023 adalah sebesar 101,34%. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 2,91 poin dari tahun sebelumnya, dimana kinerja Setmenko Marves pada tahun 2022 adalah sebesar 98,43%. Dari 9 IKU, jumlah IKU yang mencapai target adalah sebanyak 6 IKU, sedangkan yang tidak mencapai target sebanyak 3 IKU. Kendala dalam proses penyusunan regulasi dan perubahan beberapa kebijakan telah mempengaruhi pencapaian target kinerja. Rincian capaian IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Rincian Capaian IKU Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
SS.1	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	80	72,19	90,24
		2	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	60	75,76	120
		3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		4	Nilai SPIP Terintegrasi	> 3	3,425	100
		5	Nilai Kinerja Anggaran	93	93,085	100,09
		6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4,3	4,49	104,4
SS.2	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Elektronik	7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,2	3,31	103,44
		8	Peringkat JDIH Nasional	1	3	98
		9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	97,3	93,33	95,92
Total					101,34	

Pada tahun anggaran 2023, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapatkan pagu sebesar Rp307.163.431.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) dan Sekretariat Kementerian Koordinator mendapatkan pagu sebesar Rp180.382.663.000,00 (Seratus Delapan Puluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Adanya penambahan anggaran pada Agustus dan Oktober 2023, pagu Setmenko Marves sampai menjadi Rp182.289.379.000,- (Seratus Delapan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp179.658.501.268,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) atau 98,55%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp2.643.877.732,- (Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). Rincian realisasi anggaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2 Realisasi Anggaran Setmenko Marves Tahun 2023

Deskripsi	Pagu	Realisasi		Sisa
		Rp	%	
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	341.990.713.000	338.940.911.013	99,11%	3.049.801.987
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	182.302.379.000	179.658.501.268	98,55%	2.643.877.732
Biro Umum	138.510.325.000	135.891.177.632	98,11%	2.619.147.368
Biro Perencanaan	7.715.498.000	7.714.678.761	99,99%	819.239
Biro Hukum	5.592.177.000	5.591.890.023	99,99%	286.977
Biro Komunikasi	25.214.918.000	25.195.795.973	99,92%	19.122.027
Staf Ahli Menteri	1.877.358.000	1.872.871.889	99,76%	4.486.111
Inspektorat	3.392.103.000	3.392.086.990	100,00%	16.010

Keterangan: Realisasi per 31 Desember 2023





DAFTAR ISI

■ KATA PENGANTAR	ii
■ RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
■ DAFTAR ISI	v
■ DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN GRAFIK	vi
■ BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
1.2 Struktur Organisasi	3
1.3 Potensi dan Permasalahan	4
1.4 Sistematika Penyajian	5
■ BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.2 Indikator Kinerja Utama	8
2.3 Program dan Kegiatan	11
2.4 Perjanjian Kinerja	13
2.5 Pengukuran Kinerja	11
■ BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Capaian Kinerja Setmenko Marves	13
Sasaran Strategis (SS) 1	14
Sasaran Strategis (SS) 2	26
3.2 Realisasi Anggaran	33
3.3 Analisis Sumber Daya	33
3.3.1 Analisis Sumber Daya Anggaran	33
3.3.2 Analisis Sumber Daya Manusia	36
3.3.3 Implementasi Aplikasi	41
3.3.4 Konsolidasi Perangkat Infrastruktur TIK dan Perangkat Pengguna	42
3.3.5 Efisiensi Anggaran	43
3.3.6 Efisiensi Ruang Kerja Melalui Implementasi Konsep ABW	44
3.3.7 Implementasi Kebijakan SDM	45
■ BAB IV PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Rekomendasi	48
■ LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN GRAFIK

Daftar Tabel

Tabel 1	Rincian Capaian IKU Tahun 2023	iii
Tabel 2	Realisasi Anggaran Setmenko Marves Tahun 2023.....	iv
Tabel 3	IKU Setmenko dalam Renstra 2020-2024	8
Tabel 4	Sasaran Strategis, IKU dan Target Tahun 2023 Semula – Menjadi	9
Tabel 5	Program Sekretariat Kemenko Marves Tahun 2020-2024	11
Tabel 6	Alokasi Anggaran Setmenko Marves Tahun 2023.....	13
Tabel 7	Rincian Target Kinerja Sekretariat Kemenko Marves Tahun 2023.....	13
Tabel 8	Capaian Kinerja Tahun 2023	16
Tabel 9	Capaian Kinerja SS.1.....	17
Tabel 10	Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Kemenko Marves 2023.....	18
Tabel 11	Perbandingan Capaian dan Target IKU 1.....	18
Tabel 12	Perbandingan Capaian dan Target IKU 2.....	20
Tabel 13	Perbandingan Capaian dan Target IKU 4.....	21
Tabel 14	Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Marves.....	23
Tabel 15	Perbandingan Capaian dan Target IKU 4.....	24
Tabel 16	Rincian perubahan nilai maturitas SPIP setelah evaluasi BPKP	25
Tabel 17	Perbandingan Capaian dan Target IKU 5.....	27
Tabel 18	Rincian Perhitungan NKA	27
Tabel 19	Perbandingan Capaian dan Target IKU 6.....	28
Tabel 20	Rincian Hasil Nilai PEKPPP.....	28
Tabel 21	Capaian Kinerja SS.2.....	29
Tabel 22	Perbandingan Capaian dan Target IKU 7.....	30
Tabel 23	Perbandingan Capaian dan Target IKU 8.....	31
Tabel 24	Perbandingan Capaian dan Target IKU 9.....	32
Tabel 25	Realisasi Anggaran Lingkup Setmenko Marves Tahun 2023	33
Tabel 26	Realisasi IKU 1	33
Tabel 27	Realisasi IKU 2	34
Tabel 28	Realisasi IKU 3	34
Tabel 29	Realisasi IKU 4	34
Tabel 30	Realisasi IKU 5	38
Tabel 31	Realisasi IKU 6	38
Tabel 32	Realisasi IKU 7	38
Tabel 33	Realisasi IKU 8	39
Tabel 34	Realisasi IKU 9	39
Tabel 35	Data Pegawai Berdasarkan Gender	39
Tabel 36	Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	39
Tabel 37	Data Pegawai Berdasarkan Usia	40
Tabel 38	Data Pegawai Berdasarkan Pangkat.....	40
Tabel 39	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	40
Tabel 40	Data Pegawai Berdasarkan Unit Kerja lingkup Setmenko Marves	40
Tabel 41	Data Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Fungsional.....	41
Tabel 42	Anggaran Belanja TIK Unit Kerja Setmenko Marves Tahun 2023.....	43
Tabel 43	Pembagian Ruang Kerja.....	41

Daftar Gambar

Gambar 1	Struktur Organisasi Sekretariat Kemenko Marves	3
Gambar 2	Pohon Kinerja Setmenko Marves	9
Gambar 3	Pemberian Penghargaan JDIH.....	32
Gambar 4	Contoh hasil inovasi website JDIH.....	31

Daftar Grafik

Grafik 1	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Setmenko Tahun 2018-2023.....	17
Grafik 2	Rincian Jumlah Kunjungan website JDIH Maritim	32
Grafik 3	Data Pegawai yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi.....	41

An aerial photograph of a tropical bay. In the background, there are lush green hills and a prominent conical mountain. The water is a vibrant blue, with several boats of various sizes scattered across the bay. In the foreground, a sandy beach is visible, with a wooden pier structure extending into the water. A small hut is situated on the beach, and a large tree is in the lower-left corner. The overall scene is bright and scenic.

1 PENDAHULUAN

BABI

PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Setmenko Marves) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Marves. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut efektif, maka pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Rencana Strategis Setmenko Marves Tahun 2020-2024.

Laporan kinerja Tahun 2023 Setmenko disusun sebagai bentuk penyebaran informasi dan pertanggungjawaban pencapaian kinerja. Penyusunan Laporan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014. Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Setmenko sebagai bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kementerian Koordinator adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:



01 Koordinasi kegiatan Kemenko Marves;



02 Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kemenko Marves;



03 Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kemenko Marves;



04 Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;



05 Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;



06 Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;



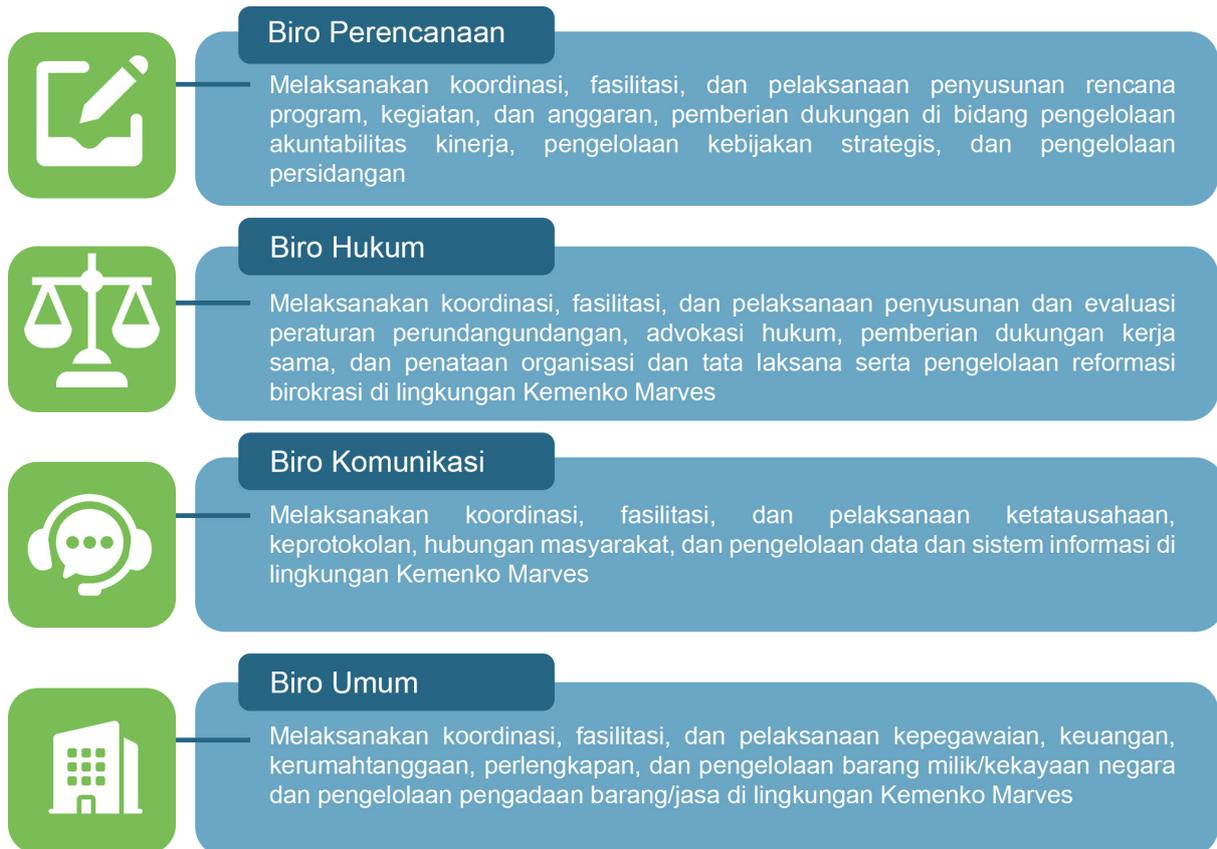
07 Pengelolaan data dan sistem informasi;



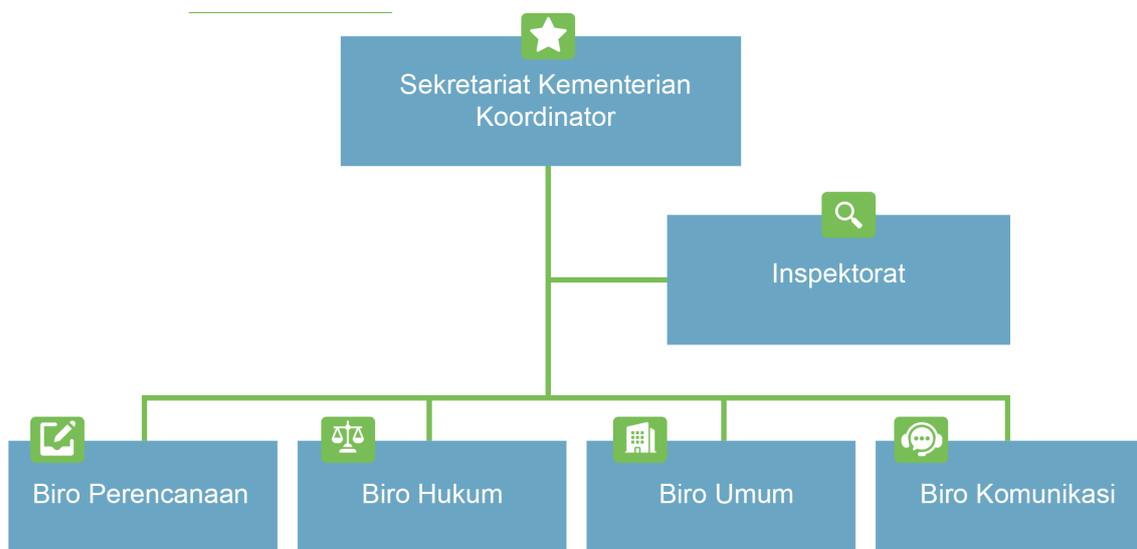
08 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

1.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdiri dari:



Selain membawahi 4 (empat) biro tersebut di atas, Setmenko Marves, atas nama Menteri Koordinator, juga mengoordinasikan unit kerja Inspektorat yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kemenko Marves. Bagan struktur organisasi Setmenko dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Kemenko Marves

Dalam struktur organisasi Kemenko Marves, sesuai dengan Permenko Nomor 10 Tahun 2020, Inspektorat di bawah perintah langsung Menteri Koordinator. Namun dalam operasional dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Kementerian Koordinator. Sehingga dalam penyajian Laporan Kinerja Setmenko ini memasukan capaian kinerja yang dihasilkan/menjadi tanggung jawab Inspektorat.

1.3. Potensi dan Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Setmenko Marves dihadapkan dengan berbagai isu strategis sebagaimana dijelaskan dalam poin-poin berikut.

1.3.1 Lingkungan Internal

- Sumberdaya Manusia



Pada saat awal Kemenko Marves diisi oleh ASN yang berasal dari berbagai instansi baik pusat maupun daerah yang relatif bukan ASN muda. Penerimaan ASN baru dilaksanakan 3 (tiga) angkatan tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022 sehingga terdapat *gap* usia dalam struktur usia ASN Kemenko. Hal ini sedikit banyak dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap regenerasi ASN yang kompeten.

Meskipun terdapat *gap* dari sisi usia dan pengalaman, dalam lima tahun terakhir Kemenko Marves melakukan rekrutmen pegawai. Dari hasil rekrutmen ini banyak masuk tenaga muda milenial yang memiliki potensi besar. Namun demikian, pegawai baru milenial tersebut perlu diberikan bimbingan dan kepercayaan dalam pelaksanaan tugas.

- Dukungan Sarana dan Prasarana



Dengan adanya penambahan unit kerja eselon I dan II lingkup Kemenko Marves, dibutuhkan penambahan dukungan sarana dan prasarana kerja yang dipenuhi secara bertahap. Selain penyediaan ruang kerja, terdapat pula dukungan sarana prasarana transportasi berupa kendaraan bermotor serta sarana prasarana TIK untuk menunjang tugas-tugas dan tanggung jawab Sekretariat Kementerian Koordinator dalam menyelenggarakan SPBE. Ini merupakan kekuatan yang harus dibangun, dikembangkan dan dipelihara terus menerus.

- Dukungan Anggaran



Sekretariat Kemenko Marves sejak awal dibentuknya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mendapatkan dukungan yang cukup memadai. Dukungan anggaran dimaksud sebagian besar digunakan untuk menyiapkan sarana-prasarana, pengembangan kompetensi SDM dan biaya operasional kantor.

- Dukungan Kelembagaan dan Regulasi



Dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan untuk menunjang tugas, penguatan organisasi, implementasi proses bisnis dan SOP, serta implementasi budaya kerja.

1.3.2 Lingkungan Eksternal

- Regulasi dan Kebijakan



Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Penyederhanaan Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. Tugas jajaran Sekretariat Kementerian

Koordinator terkait dengan arahan pertama, Pembangunan sumberdaya manusia, dan arahan ke-4, penyederhanaan birokrasi.

Arahan untuk penyederhanaan birokrasi yang ditindaklanjuti dengan pemangkasan sejumlah struktur eselon 3 dan 4, merupakan tantangan tersendiri bagi jajaran Sekretariat Kementerian Koordinator. Penyederhanaan Birokrasi ini akan memengaruhi tata kelola kelembagaan yang selama ini dijalankan.

- **Perkembangan Teknologi**

Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah begitu pesat. Berbagai aplikasi berbasis TIK dalam pengelolaan pemerintahan telah tersedia dan/atau dapat dibangun. Hal ini akan memberikan kemudahan, meningkatkan akurasi dan mempercepat pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

Teknologi informasi dan komunikasi dalam birokrasi saat ini telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain Pengelolaan keuangan dan BMN, Penganggaran pembangunan, Pengelolaan kinerja, Pengelolaan kepegawaian, Pengelolaan data, dan lain-lain.

- **Kondisi Lingkungan**

Faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi pekerjaan di bidang kesekretariatan adalah faktor lingkungan, baik lingkungan hidup, sosial ekonomi maupun lainnya. Dalam bidang sosial politik, sebagai dampak perkembangan teknologi informasi, berkembang pula paham radikalisme yang dapat membahayakan ketahanan negara. Ini juga menjadi tantangan untuk membentengi ASN dari paham radikalisme dan ideologi yang bertentangan dengan azas negara Pancasila.

1.4. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Setmenko Marves selama periode 2023. Kemudian membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap capaian kinerja tersebut, sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut di atas, sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2023 Setmenko Marves adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan; Pada bab ini menjelaskan secara umum tentang: tugas dan fungsi, organisasi, peran strategis, sumberdaya Setmenko Marves serta sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja; Diuraikan mengenai: rencana strategis, program dan kegiatan, perjanjian kinerja tahun 2023, pengukuran kinerja organisasi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja; Pada bab ini diuraikan mengenai:

- 1) Realisasi Kinerja Setmenko Marves
- 2) Realisasi Anggaran
- 3) Realisasi Kinerja lainnya
 - Tugas Tambahan program dan kegiatan Setmenko Marves;
 - Capaian lainnya.

Bab IV Penutup; Berisikan penjelasan kesimpulan dan tindaklanjut dimasa depan

Lampiran; berisikan dokumen yang mendukung informasi terkait Bab sebelumnya



2 PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

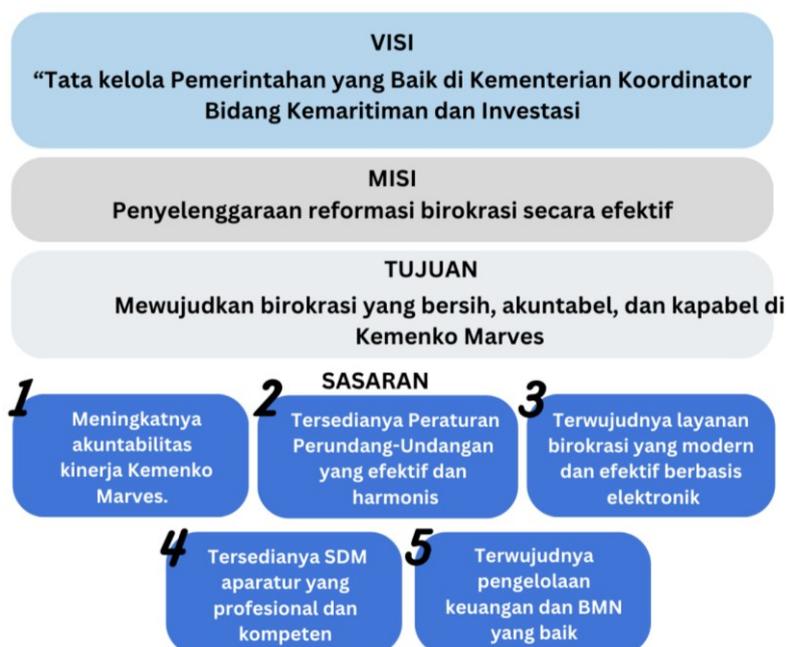
Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan Menteri Koordinator sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Pada tingkat Setmenko Marves diimplementasikan dalam pernyataan Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta perjanjian kinerja para Kepala Biro. Strategi pencapaiannya digambarkan pada peta strategi Setmenko Kemaritiman dan Investasi sebagai target kinerja yang ditetapkan dan akan direalisasikan secara berkala pada periode masing-masing.

2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan Renstra Setmenko Marves tahun 2020-2024 Sekretariat Kemenko mempunyai tujuan untuk Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan kapabel di Kemenko Marves. Rumusan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Fungsi Setmenko sesuai Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Marves;
2. Sekretariat Koordinator merupakan unit kerja pendukung bagi unit kerja eselon I lainnya di lingkup Kemenko Marves agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal;
3. Budaya kerja organisasi di Kemenko Marves yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaktif, Kolaboratif (BerAKHLAK).

Visi Kemenko Marves 2020-2024 adalah Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong", maka visi Setmenko Marves 2020-2024 ditetapkan untuk membantu mewujudkan visi Kemenko Marves tersebut. Dalam rangka mewujudkan visi Kemenko Marves, maka Visi Sekretariat Kementerian Koordinator yaitu:



2.2 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program, Setmenko berkontribusi pada 1 program yakni program dukungan manajemen, yang merupakan layanan internal untuk menunjang pelaksanaan program Pelaksanaan Kebijakan di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut efektif dilaksanakan, maka dirumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Strategis. Berikut IKU Setmenko dalam Renstra 2020-2024.

Tabel 3 IKU Setmenko dalam Renstra 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					UNIT PELAKSANA	
		2020	2021	2022	2023	2024		
Stakeholders Perspective/Indikator Tujuan								
SS1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan kapabel di Kemenko Marves	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	75	78	83	87	90	Semua Biro Inspektorat
Customers Perspective/Indikator Sasaran								
SS2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kemenko Marves	Nilai SAKIP Kemenko Marves	72	75	78	80	85	Biro Perencanaan
SS3	Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan yang efektif dan harmonis	Nilai RB area penataan PUU	3,2	3,5	3,8	4,1	4,5	Biro Hukum
SS4	Terwujudnya layanan birokrasi yang modern dan efektif Berbasis Eelektronik	Indeks SPBE	2,5	3	3,25	3,25	3,5	Biro Komunikasi
SS5	Tersedianya SDM aparatur yang professional dan kompeten	Indeks Profesionalitas ASN	71	75	80	85	90	Biro Umum
SS6	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMN yang baik di Kemenko Marves	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat

Sumber: Renstra Setmenko Marves, 2020 – 2024

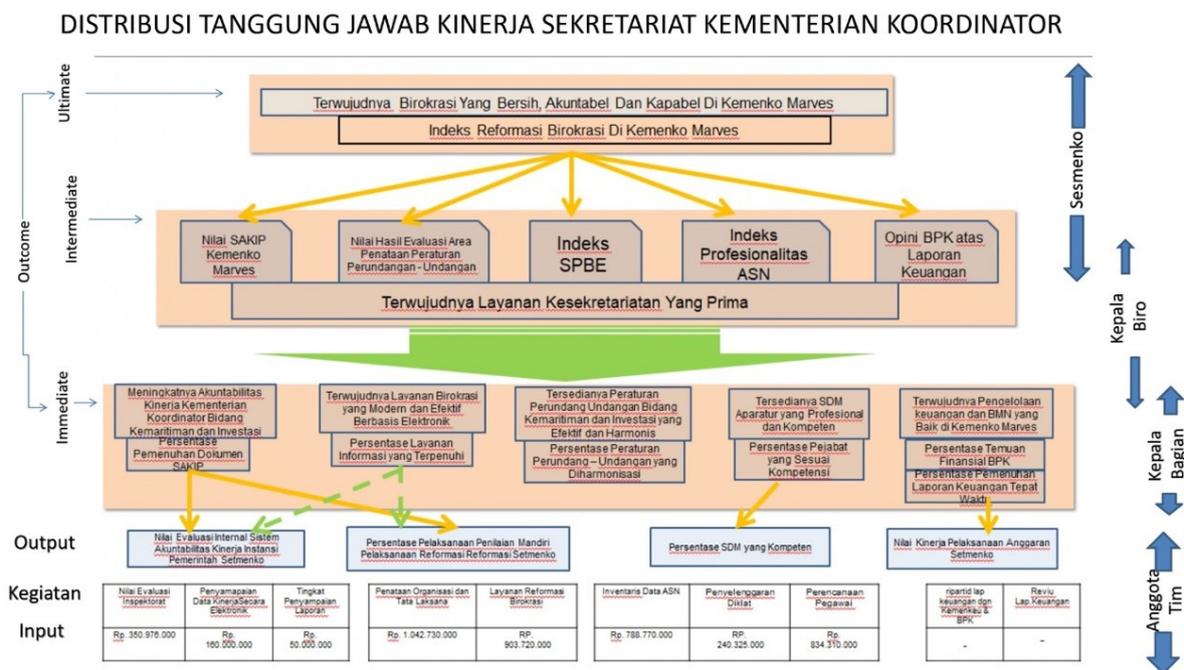
Memperhatikan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada hasil evaluasi SAKIP Kemenko Marves tahun 2020 dan 2021, bahwa rendahnya tingkat kendali Kemenko Marves terhadap beberapa IKU serta rendahnya kontinuitas ketersediaan data untuk beberapa IKU Kemenko Marves perlu dilakukan penajaman. Kemenko Marves telah melakukan reuiu Renstra untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Reuiu dilakukan sampai pada level Eselon II.

Hasil reuiu Renstra tersebut terkendala ketentuan dalam Permen PPN/Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 untuk penetapannya, sehingga penetapan Renstra hasil reuiu belum dapat dilakukan. Atas

rekomendasi Bappenas, agar rekomendasi dari KemenPANRB tetap dapat ditindaklanjuti, maka hasil rewiu renstra dimaksud dituangkan dalam konsep Perjanjian Kinerja (PK) Kemenko Marves tahun 2023. Perubahan setelah rewiu sebagai berikut:

1. Menggunakan *logical framework* yang sebelumnya menggunakan *Balanced Score Card*.
2. Jumlah Sasaran Strategis menjadi 10 SS dari 16 SS pada Renstra sebelumnya.
3. Jumlah IKU menjadi 9 IKU dari 16 IKU pada Renstra sebelumnya.

Untuk membangun rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja, serta untuk membantu organisasi memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja dan mencari cara untuk meningkatkannya Setmenko Marves menyusun pohon kinerja sebagai berikut:



Gambar 2 Pohon Kinerja Setmenko Marves

Sasaran Strategis, IKU dan target sebelum dan sesudah rewiu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4 Sasaran Strategis, IKU dan Target Tahun 2023 Semula – Menjadi

Semula			Menjadi			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	
Program Dukungan Manajemen						
Stakeholders Perspective						
SS.1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Kapabel di Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Maritim	SS.1	Terwujudnya Layanan Keskretariat an yang Prima	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi	80
					Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil	60

Semula			Menjadi			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	
Program Dukungan Manajemen						
				Negara (ASN)		
				Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	
				Nilai SPIP Terintegrasi	>3	
				Nilai Kinerja Anggaran	93	
				Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4,3	
Customer Perspective						
SS.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Nilai SAKIP Kemenko Marves			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,2
SS.3	Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Efektif dan Harmonis	Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang – Undangan	SS.2	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Elektronik	Peringkat JDIIH Nasional	1
SS.4	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Elektronik	Indeks SPBE			Indeks Nilai Keterbukaan Informasi Publik	97,3
SS.5	Tersedianya SDM Aparatur Yang Profesional dan Kompeten	Indeks Profesionalitas ASN				
SS.6	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Opini BPK atas Laporan Keuangan				
Internal Buiseness Process						
SS.7	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Program & Anggaran serta Peraturan Perundang - Undangan yang Efektif	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program yang Sesuai dengan Ketentuan				
		Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi pada Tahun Berjalan				
SS.8	Terselenggaranya Pelayanan Kesekretaria-tan yang Prima	Persentase Sistem Layanan Kepegawai-an yang Baik				
		Persentase Penyelesaian Tagihan atas Beban Negara yang Tepat Waktu				
		Persentase Opini Publik yang Positif				
		Persentase Pengadaan Barang & Jasa yang Tepat Waktu				

Semula			Menjadi		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
Program Dukungan Manajemen					
SS.9	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik	Jumlah Pedum Manajerial yang Ditetapkan			
SS.10	Terselenggaranya Pengelolaan BMN dan Layanan Sistem Informasi yang Baik	Persentase Tingkat Ketaatan Penyampai-an Laporan Barang Milik Negara			
		Pemenuhan Kebutuhan Minimal Aplikasi Umum yang Terintegrasi Lingkup Kemenko Marves			
Learning and Growth					
SS.11	Tersedianya SDM yang Kompeten di Setmenko Marves	Persentase SDM yang Kompeten			
SS.12	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Setmenko Marves	Nilai PMPRB Setmenko			
		Nilai SAKIP Setmenko			
SS.13	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Setmenko Marves	Nilai IKPA Setmenko			

2.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan kebijakan, Setmenko Marves tahun 2023 didukung oleh program sebagai berikut.

Tabel 5 Program Sekretariat Kemenko Marves Tahun 2020-2024

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	UNIT PELAKSANA
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi penyusunan arah kebijakan bidang Kemaritiman di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	100	Sekretariat Kemenko
1	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Terlaksananya Layanan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	6	Biro Umum

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	UNIT PELAKSANA
2	Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program dan Anggaran, Dukungan Kebijakan Strategis, Persidangan dan Akuntabilitas Kinerja	Terselenggaranya Layanan Perencanaan Program dan Anggaran, Dukungan Kebijakan Strategis, Persidangan dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Layanan Perencanaan Program dan Anggaran, Dukungan Kebijakan Strategis, Persidangan dan Akuntabilitas Kinerja	4	Biro Perencanaan
3	Pengelolaan Layanan Hukum, Kerjasama, Organisasi dan Tata Laksana	Terselenggaranya Layanan Perancang Peraturan Perundangundangan, Layanan Advokasi dan Informasi Hukum, Layanan Pengelolaan Kerjasama, Layanan Organisasi dan Tata Laksana	Jumlah Layanan Perancang Peraturan Perundangundangan, Layanan Advokasi dan Informasi Hukum, Layanan Pengelolaan Kerjasama, Layanan Organisasi dan Tata Laksana	4	Biro Hukum
4	Penyelenggaraan Layanan Komunikasi	Terselenggaranya Layanan Data dan Informasi, Layanan (BMN), Layanan Protokoler, Layanan Umum, dan Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Data dan Informasi, Layanan (BMN), Layanan Protokoler, Layanan Umum, dan Layanan Perkantoran	3	Biro Komunikasi
5	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi	Terselenggaranya Layanan Audit Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Jumlah Layanan Audit Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1	Inspektorat
6	Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman Nasional	Terselaksananya Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman	Jumlah layanan Penguatan dan Penataan Regulasi dan kelembagaan Kemaritiman	4	Staf Ahli

Sumber: Renstra Setmenko Marves 2020-2024

Perencanaan anggaran Setmenko pada dasarnya mengacu kepada Renstra Setmenko Marves 2020-2024, namun setiap tahun anggaran dituangkan lebih spesifik menyesuaikan kondisi terkini secara internal dan eksternal guna mendukung pelaksanaan kegiatan di Unit Deputi dalam mendukung RKP (Rencana Kerja Pemerintah).

Perencanaan program/kegiatan Setmenko telah mempertimbangkan berbagai perkembangan isu dan kondisi terkini ingkungan strategis serta kebijakan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, diantaranya 1) perubahan pendekatan yang semula *Money Follow Function* menjadi *Money Follow Program*, 2) pendekatan Perencanaan pembangunan nasional yang holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial, dan 3) penajaman Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Nasional dalam RKP. Pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab Sekretariat Kemenko Marves tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebagai berikut.

Tabel 6 Alokasi Anggaran Setmenko Marves Tahun 2023

Es2	Deskripsi	Pagu
	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	308.919.431.000,00
S	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	182.138.663.000,00
S1	Biro Umum	140.646.609.000,00
S2	Biro Perencanaan	7.715.498.000,00
S3	Biro Hukum	5.592.177.000,00
S4	Biro Komunikasi	24.792.276.000,00
S5	Inspektorat	3.392.103.000,00

2.4 Perjanjian Kinerja

Tabel 7 Rincian Target Kinerja Sekretariat Kemenko Marves Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUN 2023
SS.1	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	80
		2	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	60
		3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		4	Nilai SPIP Terintegrasi	> 3
		5	Nilai Kinerja Anggaran	93
		6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4,3
SS.2	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Elektronik	7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.2
		8	Peringkat JDIH Nasional	1
		9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	97,3

2.5 Pengukuran Kinerja

Penghitungan capaian kinerja adalah dengan membandingkan nilai realisasi capaian dengan target yang ditetapkan. Khusus untuk realisasi yang capaiannya lebih 120% dari target, akan disampaikan/dilaporkan 120%. Hal ini ditetapkan dengan alasan agar unit pelaksana kegiatan dapat merencanakan target kinerja dengan lebih cermat dan sesuai dengan kelayakan berdasarkan kemampuan personil dan anggaran yang ada. Perhitungan capaian dari realisasi kinerja dihitung dengan cara sebagai berikut.

1. Menghitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO) :
 - a. NKO dihitung dari pencapaian seluruh IKU yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

$$\bullet \text{ NKO} = \sum \% \text{Skor IKU}$$

- %Skor IKU = Koefisien Bobot IKU x %Capaian IKU
- Koefisien Bobot IKU = $\frac{\text{Bobot IKU}}{\sum \text{Bobot IKU}}$
- Bobot IKU

Kualitas IKU	Bobot
<i>Ultimate Outcome</i>	0,4
<i>Intermediate Outcome</i>	0,3
<i>Immediate Outcome</i>	0,2
<i>Output</i>	0,1

- Predikat Organisasi

Predikat	NKO
Istimewa	100 < NKO ≤ 120
Baik	90 ≤ NKO ≤ 100
Butuh Perbaikan	70 ≤ NKO < 90
Kurang	50 ≤ NKO < 70
Sangat Kurang	<50

- b. Menghitung persentase NKO, yaitu dengan membagi capaian berbanding targetnya

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- c. Menghitung Nilai Kinerja Sasaran Strategis (NKSS) adalah dengan mengalikan Capaian IKU dengan Data Dukung (*evidence*)

$$\text{Capaian Final IKU} = \text{Capaian IKU} \times \text{Data Dukung}$$





3 AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Setmenko Marves

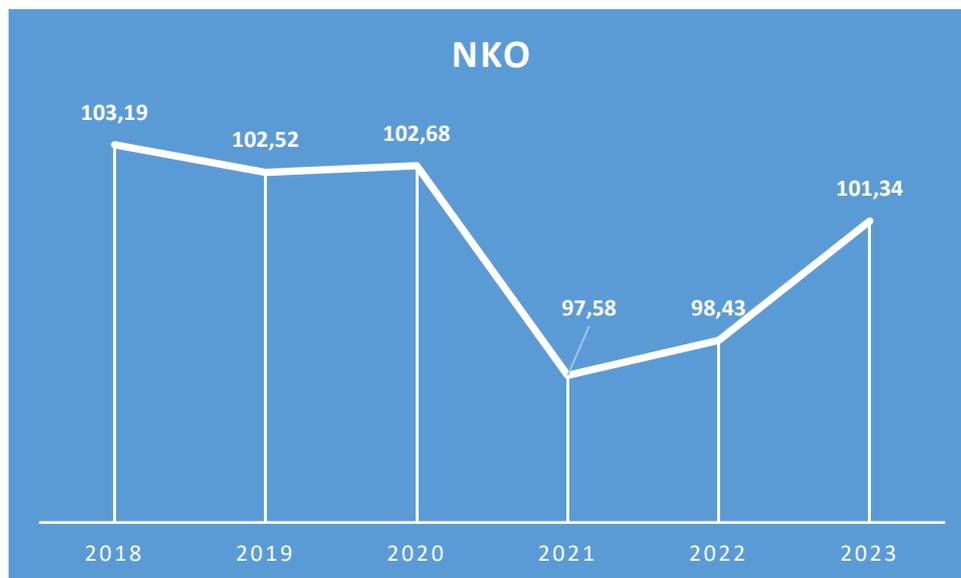
Dalam pengelolaan kinerja Tahun 2023, Setmenko Marves telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis (SS) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja Setmenko Marves hingga akhir periode 2023 sebesar 101,34%. Realisasi capaian kinerja Setmenko Marves Tahun 2023 secara keseluruhan yakni sebagai berikut.

Tabel 8 Capaian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran Strategis 1						102,46%
SS.1	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	80	72,19	90,24%
		2	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	60	75,76	120%
		3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
		4	Nilai SPIP Terintegrasi	> 3	3,425	100%
		5	Nilai Kinerja Anggaran	93	93,085	100,09%
		6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4,3	4,49	104,4%
Sasaran Strategis 2						99,11%
SS.2	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Elektronik	7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,2	3,31	103,44%
		8	Peringkat JDIH Nasional	1	3	98%
		9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	97,3	93,33	95,92%
Total						100,79%

*) Digunakan nilai capaian maksimal 120%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dengan menggunakan perbandingan antara target dengan capaian Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka diperoleh data **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2023 sebesar 101,34%**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut. Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut.



Grafik 1 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Setmenko Tahun 2018-2023

Penjelasan dan rincian dari masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut.

Sasaran Strategis (SS) 1

Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima

Maksud dari sasaran ini yakni terlaksananya pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau lingkup Setmenko Marves. Dengan adanya pelayanan Kesekretariatan yang prima maka akan tercipta suasana kerja yang baik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sasaran strategis 1 (SS.1) ini dijabarkan melalui 6 IKU sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9 Capaian Kinerja SS.1

No	Nama IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	80	72,19	90,24
2	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	60	75,76	120
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
4	Nilai SPIP Terintegrasi	> 3	3,425	100
5	Nilai Kinerja Anggaran	93	93,085	100,09
6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4,3	4,49	104,4
				102,46

IKU 1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Nilai SAKIP Kemenko Marves merupakan nilai hasil evaluasi KemenPANRB terhadap pelaksanaan SAKIP di Kemenko Marves. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88

Tahun 2021 tentang Evaluasi AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini yakni untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

Ruang lingkup evaluasi SAKIP meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level Kementerian/Lembaga maupun unit kerja. Pelaksanaan evaluasi menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPANRB Nomor B/45/AA.05/2023 pada tanggal 27 November 2023, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kemenko Marves pada tahun 2023 menunjukkan nilai 72,19 dengan predikat “**BB**”. Hal tersebut menunjukkan implementasi akuntabilitas kinerja “**Sangat Baik**”, yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada K/L dan sebagian unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Rincian hasil evaluasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 10 Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Kemenko Marves 2023

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	21,50	21,90
2	Pengukuran Kinerja	30	20,05	20,29
3	Pelaporan Kinerja	15	11,54	11,79
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,05	18,21
	Nilai Hasil Evaluasi	100	71,14	72,19
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Untuk melakukan perbandingan terhadap nilai SAKIP periode 2022 dengan periode 2023 dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 11 Perbandingan Capaian dan Target IKU 1

No	Nama IKU	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target RPJMN/Nasional
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	71,14	72,19	80	85	-

Untuk mencapai nilai SAKIP dengan predikat BB, Kemenko Marves **didukung** oleh konsistensi seluruh pengampu SAKIP dalam meningkatkan nilai hasil evaluasi dari periode sebelumnya. Hal tersebut tercermin dalam terlaksananya upaya perbaikan dari rekomendasi hasil evaluasi periode 2022 melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Kemenko Marves sedang berproses dalam reviu rencana strategis dengan menyampaikan perubahan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja level kementerian dan unit kerja;
2. Koordinasi dalam penetapan target kinerja agar selaras dengan K/L teknis selaku eksekutor;
3. Penajaman rencana aksi dan manual IKU serta monev *updating* capaian kinerja;
4. Penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal melalui Permenko Marves Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenko Marves;
5. Evaluasi internal untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan evaluasi dan memastikan bahwa unit kerja siap untuk dievaluasi.

Meskipun didukung oleh beberapa hal tersebut, Kemenko Marves dihadapkan oleh beberapa **kendala/hambatan** sehingga nilai hasil evaluasi SAKIP belum tercapai dengan maksimal, diantaranya:

1. Meskipun secara substansi perjanjian kinerja tahun 2023 lebih baik dan sudah menunjukkan kinerja sebagai kementerian koordinator dibandingkan periode sebelumnya, namun dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dengan jangka pendek belum selaras. Selain itu, *crosscutting* antar eselon 1 dalam pohon kinerja belum dijabarkan secara spesifik.
2. Dalam pengukuran, masih terdapat data kinerja yang belum sepenuhnya andal untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Selain itu, aplikasi SIK-Marves saat ini masih dalam proses pengembangan untuk integrasi dengan beberapa aplikasi lainnya.
3. Analisis faktor keberhasilan, kendala, rekomendasi, dan tindak lanjut belum terlihat dalam dokumen laporan kinerja unit kerja. Selain itu beberapa data kinerja yang disampaikan belum memenuhi prinsip *reliable*.
4. Catatan evaluasi belum disertai dengan rekomendasi yang konkrit, sehingga kualitas laporan hasil evaluasi belum maksimal.

Beberapa **rekomendasi** yang dapat diberikan untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada di periode selanjutnya yakni:

1. Memastikan reviu dokumen perencanaan kinerja memperhatikan kaidah penyusunan.
2. Memastikan adanya penjabaran kinerja yang dimulai dengan menyusun pohon kinerja berdasarkan *logical framework* dan menyempurnakan *crosscutting* antar eselon 1.
3. Melakukan reviu atas formulasi pengukuran kinerja khususnya untuk indikator yang membutuhkan kolaborasi antar unit/entitas.
4. Terus berproses dalam mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja, baik tingkat unit kerja maupun individu pegawai.
5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja yang mengacu pada PermenPANRB 53/2014 dengan melengkapi poin-poin analisis capaian kinerja.
6. Memastikan data kinerja dalam laporan kinerja *reliable* baik dari hasil perhitungan data kinerja, kualitas data, serta kejelasan sumber data.
7. Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi yang sesuai dengan temuan dan permasalahan utama dalam implementasi SAKIP.
8. Mendorong hasil evaluasi SAKIP internal untuk dapat memberikan langkah-langkah perbaikan nyata.

IKU 2. Indeks Profesionalitas ASN

Indikator ini menggambarkan tingkat kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memenuhi persyaratan kompetensi manajerial, sosio-kultural dan teknis meningkatkan profesionalitasnya. Kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Tujuannya untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN serta sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Pengukuran Indeks Profesionalitas (IP) ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Dasar hukum pengukuran adalah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup dimensi kualifikasi (25%), dimensi kompetensi (40%), dimensi kinerja (30%), dan dimensi disiplin (5%).

Nilai IP ASN Kemenko Marves menggunakan capaian IP ASN tahun 2022 yang telah dirilis pada periode triwulan III tahun 2023, yakni sebesar 75,76. Sementara itu, capaian IP ASN tahun 2023 diperkirakan akan dirilis pada pertengahan 2024. Hasil kinerja yang diukur yaitu evaluasi perseorangan untuk kemudian dirata-rata dan diukur sesuai Perka BKN. Untuk melakukan perbandingan capaian kinerja dengan periode sebelumnya serta dengan target tahun akhir Renstra yaitu 2024 dan target RPJMN/Nasional dapat disampaikan di dalam tabel berikut.

Tabel 12 Perbandingan Capaian dan Target IKU 2

No	Nama IKU	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target RPJMN/Nasional
2	Indeks Profesionalitas ASN	59,82 ^a	75,76 ^b	60	90	-

Keterangan: ^a) Capaian IP ASN Tahun 2021 dan ^b) Capaian IP ASN Tahun 2022

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai capaian IP ASN 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini dapat terjadi karena **dukungan beberapa faktor**, di antaranya terjadinya koordinasi yang baik dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) serta sumber data kinerja pegawai yang telah tersinkronisasi dengan sistem aplikasi e-kinerja BKN, sehingga memudahkan dalam proses pengukuran. Selain itu, adanya kebijakan dari BKN yang memiliki peran pendukung penting untuk mengunggah surat pernyataan mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi klasikal yang relevan dengan jabatan fungsional sebagai pengganti pelatihan fungsional.

Untuk mencapai nilai tersebut, beberapa kegiatan pendukung juga telah dilakukan oleh Setmenko Marves, yakni:

1. Menginventarisir data untuk setiap indikator penilaian.
2. Melakukan *input* data pelatihan pada SIASN BKN sebagai langkah mengunggah sumber data indikator dimensi kompetensi.
3. Membuat surat pernyataan melakukan input data dan pernyataan melakukan pengembangan kompetensi sesuai format BKN.

4. Konsistensi keaktifan pegawai dalam mengunggah dokumen sertifikat pelatihan pada Marves-HR yang memudahkan kepegawaian Biro Umum mendapatkan sumber data kompetensi.

Meskipun sudah mencapai target yang ditentukan, Kemenko Marves dihadapkan oleh beberapa **kendala/hambatan**, yakni terbatasnya jumlah kuota pada setiap penyelenggaraan pelatihan fungsional dan pelatihan kepemimpinan oleh instansi penyelenggara, sehingga beberapa pegawai terutama PNS baru Kemenko Marves belum banyak yang dikutsertakan dalam diklat keahlian (fungsional) sesuai dengan formasi pelamaran pegawai. Hal ini juga disebabkan oleh Kemenko Marves belum memiliki Pusdiklat, sehingga masih bergantung pada ketersediaan kuota di lembaga penyelenggara pelatihan.

Permasalahan peningkatan kapasitas SDM masih menjadi catatan dalam pencapaian target IKU ini pada periode sebelumnya. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, telah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut.

1. Penetapan tugas belajar dan tugas belajar mandiri untuk lanjut pendidikan formal setingkat lebih tinggi dengan total sejumlah 13 pegawai;
2. Penetapan surat tugas pegawai untuk mengikuti pelatihan fungsional sejumlah 35 pegawai, terdiri dari:
 - a. Jabatan fungsional perencana 1 pegawai
 - b. Jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat 3 pegawai
 - c. Jabatan fungsional arsiparis 6 pegawai
 - d. Jabatan fungsional analis kebijakan 25 pegawai
3. Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan Renstra bagi pejabat fungsional perencana;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis analisis dan dokumentasi kebijakan bagi pejabat fungsional analis kebijakan;
5. Pengikutsertaan pegawai untuk pelatihan teknis bagi pejabat fungsional arsiparis;
6. Pengikutsertaan pegawai untuk pelatihan teknis substansi kemaritiman dan investasi yang diselenggarakan oleh Kemenko Marves, Instansi eksternal dan lembaga swasta;
7. Pengikutsertaan pegawai untuk pelatihan teknis bidang perbendaharaan.

PNS Kemenko Kemaritiman dan Investasi telah mengikuti beragam jenis pengembangan kompetensi sesuai amanat Peraturan Lembaga Administrasi Negara baik dalam bentuk pendidikan, pelatihan klasikal dan non klasikal. Keseluruhan persentase PNS Kemenkomarves yang telah mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun 2023 sejumlah 96%. Pengembangan kompetensi yang dimaksud meliputi tugas belajar sejumlah 73 pegawai, pelatihan klasikal sejumlah 458 pegawai, dan pelatihan dalam jabatan fungsional sejumlah 97 pegawai.

Untuk meningkatkan nilai capaian IP ASN pada periode selanjutnya, beberapa **rekomendasi/tindak lanjut** yang dapat dilakukan yakni:

1. Memetakan kebutuhan diklat.
2. Memanfaatkan seoptimal mungkin anggaran yang tersedia dan menjaga koordinasi yang baik dengan BKN.
3. Aktif berkomunikasi dengan pusdiklat dan memfasilitasi info beasiswa ke seluruh unit.
4. Menghimbau pegawai di lingkup Kemenko Marves untuk secara rutin memperbaharui data keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan/bimtek/kursus/seminar yang telah

selesai diikuti yang diselenggarakan baik oleh internal maupun eksternal Kemenko Marves ke dalam aplikasi MarvesHR.

5. Dalam penyesuaian peluang dan kesempatan bagi para pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan, perlu ditambahkan kuota peserta untuk dapat diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan pada tahun 2023.
6. Pegawai yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi agar dapat mengimplementasikan hasilnya dalam melaksanakan tugas keseharian.

IKU 4. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang setiap tahun yang dilakukan oleh BPK bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan kementerian/ lembaga. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan BPK mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Kementerian/ Lembaga. Selain itu, opini menunjukkan pula kualitas tata kelola keuangan pada Kementerian/Lembaga tersebut.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko dalam laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Kemenko Marves, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/Unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (*TMT/Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (*TW/Adverse Opinion*).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk melakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 serta dengan target tahun akhir Renstra yaitu 2024 dan target RPJMN/Nasional dapat disampaikan di dalam tabel berikut.

Tabel 13 Perbandingan Capaian dan Target IKU 4

No	Nama IKU	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target RPJMN/Nasional
4	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP ^a	WTP ^b	WTP	WTP	-

Keterangan: a) Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2021 dan b) Tahun 2022

Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan dalam laporan ini menggunakan capaian tahun 2022 yang telah dirilis pada periode triwulan II tahun 2023, yakni dengan predikat WTP. Sementara itu, capaian Opini BPK tahun 2023 diperkirakan akan dirilis pada pertengahan 2024. Menurut Opini BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kemenko Marves Nomor 12a/LHP/VII/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kemenko Marves tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kemenko Marves telah memperoleh opini WTP atas laporan keuangan sejak tahun 2016. Perkembangan capaian Opini BPK pada Kemenko Marves dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14 Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Marves

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
WDP	WTP						

Di tahun 2023, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menargetkan kembali untuk meraih hasil pemeriksaan dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Tercapainya target WTP pada tahun 2023 ini disebabkan oleh beberapa **faktor pendukung**, diantaranya:

1. Adanya koordinasi dan konsultasi secara aktif dengan Direktorat Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan terkait teknis penyusunan laporan keuangan dan dengan tim pemeriksa BPK terkait kemudahan dalam akses pemeriksaan di lingkungan Kemenko Marves.
2. Adanya koordinasi internal antara Tim Penyusun Laporan Keuangan, Tim Penyusun Laporan Barang Milik Negara (BMN), dan Tim Reviu Laporan Keuangan dari Inspektorat dalam pengumpulan informasi dan pembuatan laporan keuangan menjadikan proses lebih mudah untuk dilakukan dan selesai tepat waktu.
3. Sistem pengendalian internal dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan di Kemenko Marves yang memadai melalui terlaksananya Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).
4. Tingginya persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK.
5. Meningkatnya peran aktif Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam mendeteksi, mengawasi, dan mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi potensi temuan BPK.

Meskipun begitu, selama periode 2023 Kemenko Marves dihadapkan oleh beberapa **kendala/hambatan** berupa:

1. Permasalahan asset, yakni masih ditemukan beberapa aset yang tidak dapat ditelusuri, tidak dilabeli Barang Milik Negara, dan terdapat permasalahan dalam pengelolaan persediaan.
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis selaku pengelola keuangan, penyusun laporan keuangan, dan ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah.
3. Pengelolaan kas masih dilakukan secara tunai.

Untuk menjamin keberlangsungan capaian opini WTP atas laporan keuangan, maka pada tahun 2024 direncanakan untuk melaksanakan **tindak lanjut** sebagai berikut.

1. Melaksanakan inventarisasi aset agar semua aset dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan aset.
2. Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi teknis dalam pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
3. Memperbaiki pengelolaan kas secara non tunai (*cashless*).
4. Mempersiapkan standar dan prosedur untuk meningkatkan tata kelola keuangan.
5. Memaksimalkan penggunaan aplikasi SAKTI mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan.

IKU 4. Nilai SPIP Terintegrasi

Hasil kinerja yang diukur yakni penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP di Kemenko Marves dalam mencapai tujuan pengendalian. Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh BPKP ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D.

Ruang lingkup evaluasi adalah atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Kemenko Marves, meliputi:

1. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang meliputi aspek persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laoran evaluasi.

Metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil penilaian mandiri melalui wawancara, observasi, dan reviu dokumen. IKU ini baru ditargetkan pada perjanjian kinerja tahun 2023, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan periode sebelumnya maupun dengan target akhir Renstra tahun 2024. Rincian pebandingan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 15 Perbandingan Capaian dan Target IKU 4

No	Nama IKU	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target RPJMN/Nasional
4	Nilai SPIP Terintegrasi	N/A	3,425	> 3	N/A	-

Berdasarkan surat Direktorat Pengawasan Bidang Pangan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam BPKP Nomor PE.09.03/LHP-216/D102/2023 pada tanggal 25 Oktober 2023, Kemenko Marves memperoleh nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3,425 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **level 3 (Terdefinisi)**. Predikat ini menunjukkan bahwa Kemenko Marves telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Rincian perubahan nilai maturitas SPIP setelah hasil evaluasi sebagai berikut.

Tabel 16 Rincian perubahan nilai maturitas SPIP setelah evaluasi BPKP

No.	Komponen SPIP	Hasil Penilaian Mandiri (Setelah PK)	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
1	Penetapan Tujuan	2,000	1,400	-0,600
2	Struktur dan Proses	0,934	0,915	-0,019
3	Pencapaian Tujuan SPIP	1,275	1,110	-0,165
Nilai Maturitas SPIP		4,209	3,425	-0,784

Menurut BPKP, proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kemenko Marves telah **sesuai** dengan langkah-langkah pada regulasi yang berlaku. Sementara itu, catatan hasil evaluasi oleh BPKP secara umum yakni belum seluruh sasaran strategis memiliki indikator kinerja dan target kinerja yang tepat untuk mengukur keberhasilan capaian sasaran, baik pada tingkatan sasaran strategis maupun sasaran program dan kegiatan. Rincian perubahan nilai masing-masing komponen setelah evaluasi disebabkan oleh:

1. Penetapan tujuan

Adanya penyesuaian pada penilaian penetapan tujuan dan capaian level *output* serta *outcome* dengan metode *benchmarking* skor kepada hasil evaluasi SAKIP Kemenko Marves selama 3 tahun terakhir.

2. Struktur dan proses

Terdapat beberapa pemenuhan sub unsur untuk skor 3 dan 4 yang belum didukung dengan bukti evaluasi secara berkala atas kebijakan dan implementasinya.

3. Pencapaian tujuan SPIP

Terdapat penurunan pada skor unsur keandalan laporan keuangan dan unsur efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi yang disebabkan oleh penilaian mandiri belum sesuai dengan kondisi temuan LHP BPK RI dalam kurun 5 tahun terakhir, khususnya yang terkait dengan aspek persediaan dan aspek keamanan asset.

Keberhasilan pencapaian nilai IKU yang memenuhi target ini **didukung oleh beberapa faktor**, diantaranya:

1. Adanya dukungan dan pendampingan dari BPKP sebagai Instansi Pembina untuk mendorong pelaksanaan SPIP di masing-masing Kementerian/Lembaga.
2. Adanya dukungan dari Pimpinan Instansi untuk mendorong pelaksanaan SPIP di masing-masing unit kerja
3. Terlaksananya reviu Rencana Strategis pada semua level dan menggunakan konsep tersebut pada PK Tahun 2023.
4. Inspektorat melakukan evaluasi WBS (*Whistleblowing System*) secara berkala.

Meskipun IKU ini telah tercapai dengan sangat baik, namun dalam prosesnya terdapat beberapa **kendala/hambatan**, yakni beberapa bukti dukung yang diperlukan belum maksimal serta SDM yang turut serta dalam proses penilaian dari masing-masing unit belum mendapatkan pelatihan secara keseluruhan. Hal ini pula yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai antara hasil penilaian mandiri dengan hasil setelah evaluasi BPKP.

Untuk mempertahankan predikat dan meningkatkan nilai hasil evaluasi terkait SPIP Terintegrasi pada periode selanjutnya, terdapat beberapa **rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti**, diantaranya:

1. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi serta pemahaman pegawai terhadap SPIP Terintegrasi.

2. Melakukan evaluasi atas Perencanaan dan menetapkan sasaran pada masing-masing program untuk periode berikutnya serta menyusun pohon kinerja.
3. APIP melakukan kegiatan *assurance* (evaluasi atas reviu) untuk memastikan efektivitas kegiatan pengendalian dan kegiatan manajemen risiko unit kerja.

IKU 5. Nilai Kinerja Anggaran

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Evaluasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disingkat EKA adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas anggaran. Proses ini dilakukan untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) terdiri dari dua komponen, yakni nilai SMART dengan bobot 50% dan nilai IKPA dengan bobot 50%. Nilai SMART bertujuan untuk memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Nilai SMART merupakan nilai kumulatif sehingga cenderung semakin tinggi di tiap triwulannya. Nilai SMART terdiri dari beberapa indikator, dimana semakin tinggi capaian dari tiap indikator tersebut maka makin tinggi pula nilai SMART, diantaranya:

1. Capaian sasaran strategis
2. Capaian sasaran program
3. Penyerapan anggaran
4. Konsistensi rencana penarikan anggaran
5. Capaian *output* program
6. Efisiensi
7. Nilai efisiensi
8. Rata-rata NKA satker

IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) bertujuan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui beberapa indikator, dimana semakin tinggi capaian ketertiban dari tiap indikator maka semakin tinggi pula nilai IKPA. Indikator-indikator tersebut terdiri dari:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran
 - a. Revisi DIPA
 - b. Deviasi Halaman III DIPA
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran
 - a. Penyerapan Anggaran
 - b. Belanja Kontraktual
 - c. Penyelesaian Tagihan
 - d. Pengelolaan UP dan TUP
 - e. Dispensasi SPM
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
 - a. Capaian Output

IKU ini baru ditargetkan pada perjanjian kinerja tahun 2023, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan periode sebelumnya maupun dengan target akhir Renstra tahun 2024. Rincian perbandingan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 17 Perbandingan Capaian dan Target IKU 5

No	Nama IKU	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target RPJMN/Nasional
5	Nilai Kinerja Anggaran	N/A	93,085	93	N/A	-

Capaian IKU ini merupakan estimasi perhitungan internal yang didukung oleh data dari SMART dan IKPA. Rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 18 Rincian Perhitungan NKA

	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
IKPA	91,53	50%	45,765
SMART	94,64	50%	47,32
NILAI KINERJA ANGGARAN			93,085

Tercapainya target IKU ini **didukung oleh beberapa faktor**, diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara rutin sebagai wadah perbaikan dan langkah untuk memastikan bahwa proses pertanggungjawaban keuangan dilakukan tepat waktu. Selain itu, setiap triwulan di Kemenko Marves selalu menyelenggarakan pencocokan dan penelitian data dokumen pendukung administrasi keuangan seluruh unit kerja sehingga dapat mengurangi bias dan *miss statement*.

Meskipun sudah mencapai target yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja, Setmenko Marves mengalami beberapa **kendala**, yaitu:

1. Sistem aplikasi SAKTI dan SMART di Kementerian Keuangan tidak terintegrasi penuh, dimana data belum menggunakan satu *database*.
2. Sistem aplikasi SMART yang kurang fleksible dan tidak mengakomodir dinamika perencanaan. Didalam aplikasi SMART tidak tersedia menu untuk mengedit Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Hal ini menyebabkan hasil reuiu IKU Marves tidak dapat diperbaharui di aplikasi yang kemudian menyebabkan penghitungan capaian IKSS tidak menunjukkan kondisi capaian yang sebenarnya, karena IKU sebelum reuiu tetap menjadi komponen dalam capaian IKSS baru.
3. Komitmen penginputan data pada unit kerja yang belum terjaga. Adanya Perubahan aplikasi yang digunakan dalam penginputan data capaian RO dari sebelumnya aplikasi SMART menjadi SAKTI membuat proses penginputan data harus dilakukan oleh masing-masing operator SAKTI pada masing-masing unit kerja yang sebelumnya dilakukan oleh hanya Biro Perencanaan. Hal ini butuh komitmen yang kuat dari unit kerja agar penginputan tidak terlambat.

Terkait permasalahan tersebut beberapa upaya **tindak lanjut** yang sudah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan secara tertulis kepada Kemenkeu agar aplikasi dibuat lebih fleksible dan dapat mengakomodir kebutuhan dinamika perencanaan
2. Melakukan integrasi aplikasi penuh dengan menggunakan satu *database*

Beberapa **rekomendasi** yang dapat dilakukan untuk mendorong capaian pada periode yang akan datang adalah:

1. Meningkatkan pemahaman operator SAKTI dalam penginputan data dan melakukan pendampingan penginputan data
2. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulanan;
3. Mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi *output* yang berkualitas.

IKU 6. Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan, serta aspek inovasi. Nilai indeks ini dikeluarkan oleh KemenPAN & RB berdasarkan penilaian dari beberapa penunjang Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kemenko Marves sebagai instansi penyelenggaraan pelayanan publik telah menetapkan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara mandiri terhadap unit lokus pelayanan publik yang berpedoman pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) secara Mandiri. Hasil Pemantauan dan Evaluasi ini telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator.

IKU ini baru ditargetkan pada perjanjian kinerja tahun 2023, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun 2022 dan tidak memiliki target di tahun akhir renstra 2024. Rincian digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 19 Perbandingan Capaian dan Target IKU 6

No	Nama IKU	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target RPJMN/Nasional
6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	N/A	4,49	4,3	N/A	-

Hasil Nilai PEKPPP Tahun 2023 Kemenko Marves dengan Nilai 4,49 (A-) predikat Sangat Baik yang dikeluarkan Kementerian PANRB dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 795 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023. Rincian hasil nilai PEKPPP sebagai berikut.

Tabel 20 Rincian Hasil Nilai PEKPPP

No	Layanan Administrasi		Layanan Barang		Layanan Jasa		Rata-Rata	
	Indeks	Ket.	Indeks	Ket.	Indeks	Ket.	Indeks	Ket.
1	4,52	A	4,43	A-	4,52	A	4,49	A-

Tercapainya target yang telah ditentukan pada dokumen perjanjian kinerja dipengaruhi oleh beberapa **faktor pendukung** selama tahun 2023, yakni adanya pendampingan informal ke unit kerja di lingkup Setmenko serta pendampingan dalam pengisian Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM). Meskipun begitu, Setmenko Marves dihadapkan oleh **kendala/hambatan** berupa rencana pemindahan *desk* layanan satu pintu belum didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang ada serta belum semua standar pelayanan yang dimiliki oleh Kemenko Marves menggunakan format SKM yang diberikan oleh KemenpanRB.

Untuk meningkatkan Indeks di tahun 2024 dan meraih “Pelayanan Prima”, Kemenko Marves berkomitmen untuk melaksanakan rekomendasi evaluasi tahun 2023, seperti membuat *desk* layanan menjadi satu area untuk meningkatkan sarana prasara dan pelayanan yang diberikan, meningkatkan kompetensi pegawai pelayanan yang sesuai, terus melakukan inovasi yang sesuai dengan harapan public, dan mempercepat pelayanan yang ada.

Sasaran Strategis (SS) 2

Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Elektronik

Maksud dari sasaran ini yakni terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya berbasis elektronik yang terpadu. Sasaran strategis ini dijabarkan melalui 3 IKU sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 21 Capaian Kinerja SS.2

No	Nama IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,2	3,31	103,43%
8	Peringkat JDIH Nasional	1	3	98%
9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	97,3	93,33	95,91%
Nilai Capaian SS.2				99,11%

IKU 7. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri dan penilaian dokumen.

Variabel Indeks SPBE terdiri atas 4 (empat) domain, 8 (delapan) aspek dan 47 (empat puluh tujuh) indikator penilaian. Untuk melakukan perbandingan dengan capaian SPBE pada periode sebelumnya dengan target akhir tahun Renstra 2023 sebagai berikut.

Tabel 22 Perbandingan Capaian dan Target IKU 7

No	Nama IKU	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target RPJMN/Nasional
7	Indeks SPBE	2,68	3,31	3,2	3,5	-

Capaian Indeks SPBE Tahun 2023 tercantum dalam KepmenPANRB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2024, yakni sebesar 3,31. Capaian ini memiliki peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pada periode sebelumnya.

Beberapa langkah strategis yang dilaksanakan dalam rangka mendongkrak capaian IKU ini antara lain telah dibentuk Tim Koordinator dan Tim Assesor yang ditandatangani oleh Sekeretaris Kementerian Koordinator atas nama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Hal ini diperlukan dalam rangka melakukan pemantapan internalisasi maupun dalam pemenuhan *evidence* untuk 47 indikator SPBE, indikator-indikator tersebut memiliki nilai interval terendah 1 (satu) dan tertinggi bernilai 5 (lima).

Pada tahun 2023, capaian SPBE Kemenko Marves sudah memenuhi target yang ditentukan. Hal ini tentunya **didukung oleh beberapa faktor**, berupa komitmen dan ketegasan pimpinan untuk melakukan proses bisnis yang sudah disepakati merupakan hal yang berpengaruh dalam penerapan sistem dan mempermudah penyelenggaraan SPBE. Selain itu, tersedianya regulasi pendukung kegiatan SPBE juga merupakan faktor penting dalam mendukung pencapaian target. Regulasi tersebut antara lain:

1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 114S Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan penerapan SPBE di Kemenko Marves;
2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 102/S Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kemenko Marves.

Meskipun telah mencapai target yang ditentukan, dalam proses pencapaiannya Kemenko Marves juga dihadapi beberapa **kendala/hambatan** yakni belum semua indikator pengukuran yang diperlukan memiliki data dukung dan kesadaran penggunaan dan penerapan teknologi yang masih kurang serta sumber daya manusia yang masih minim pengetahuan untuk penerapan SPBE. Selain itu, domain manajemen SPBE yang meliputi aspek penerapan Manajemen SPBE dan aspek TIK juga masih lemah.

Sebagai upaya meningkatkan nilai untuk mencapai target pada akhir periode Renstra Tahun 2024, beberapa **rekomendasi/tindak lanjut** yang dapat dilaksanakan antara lain:

1. Memperhatikan pemenuhan data dukung dengan melakukan konsultasi/pendampingan dengan tenaga ahli.
2. Melakukan *update* kebijakan tentang SPBE di lingkup Kemenko Marves.
3. Melakukan peningkatan kapasitas SDM untuk pengawalan SPBE Kemenko Marves
4. Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat asistensi percepatan implementasi arsitektur SPBE di internal Kemenko Marves, bekerjasama dengan Kemenko Polhukam, KemenPANRB, Kemen Kominfo dan disinergikan dengan penguatan keamanan sistem

Informasi baik dari Kepolisian Republik Indonesia (terkait *Cyber security*) maupun bekerjasama dengan BSSN.

5. Menyelenggarakan Rakor lanjutan dengan tujuan menghasilkan rumusan roadmap inisiatif strategis percepatan dan rencana aksi implementasi SPBE.
6. Menyusun rencana pengembangan superApps yang dapat dimanfaatkan semua pihak, dimana di dalamnya terdapat miniApps yang dikontribusikan oleh setiap K/L. Diharapkan kontribusi K/L dapat membantu penyelesaian permasalahan yang 80% terdapat di daerah, sehingga mempermudah kegiatan berusaha di Indonesia.

IKU 8. Peringkat JDIH Nasional

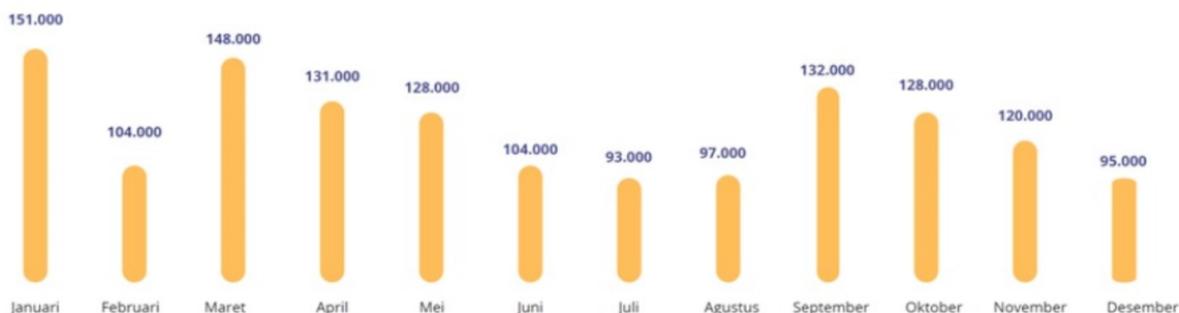
Peringkat JDIH Nasional merupakan bentuk apresiasi kepada para anggota JDIH yang telah melakukan pengelolaan JDIH sesuai dengan 7 aspek penilaian yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham. Maksud dari ditargetkannya IKU ini yakni untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.

IKU ini baru ditargetkan pada perjanjian kinerja tahun 2023, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun 2022 dan tidak memiliki target di tahun akhir renstra 2024. Rincian digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 23 Perbandingan Capaian dan Target IKU 8

No	Nama IKU	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target RPJMN/Nasional
8	Peringkat JDIH Nasional	N/A	3	1	N/A	-

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HN.03.05 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2022, telah dilakukan penilaian kinerja dengan 32 indikator dengan hasil yaitu JDIH Kemenko Marves ditetapkan sebagai JDIH Terbaik Tingkat Kementerian Tahun 2023 dengan nilai 98. JDIH Kemenko Marves berhasil meraih penghargaan pada ajang JDIH Awards 2023 sebagai Pengelola JDIH terbaik 3 kategori Tingkat Kementerian. Selain itu, Kemenko Marves juga berhasil meraih penghargaan sebagai Juara 3 LDCC Awards 2023 kategori Analisis Hukum. Selama periode 2023, *website* JDIH Kemenko Marves memiliki total kunjungan 1,4 juta pengunjung dengan rincian sebagai berikut.



Grafik 2 Rincian Jumlah Kunjungan website JDIH Maritim



Gambar 3 Pemberian Penghargaan JDIH

Beberapa kegiatan dan **faktor pendukung** dalam mencapai target yang ditentukan antara lain:

1. Terlaksananya Evaluasi JDIH Marves Tahun 2023 dan Penyampaian Rencana Kerja JDIH Tahun 2023 dengan baik.
2. Komitmen pimpinan pada proses pengelolaan JDIH Kemenko Marves dengan memastikan JDIH Marves menjadi sarana penyedia informasi yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
3. Ketersediaan SDM yang berkompeten yang terdiri dari Analis Hukum, Pranata Komputer, dan staf administrasi telah menjadi motor penggerak JDIH Marves sehingga mampu meraih prestasi dari Kementerian Hukum dan HAM selama 4 (empat) tahun berturut-turut sejak tahun 2020.
4. Program kerja inovatif dan konstruktif, meliputi:
 - a. **Sistem Manajemen Konten:** Implementasi sistem manajemen konten yang canggih untuk mengelola dokumen hukum, memungkinkan pencarian yang lebih akurat, indeksasi otomatis, dan penyajian dokumen yang mudah dimengerti melalui pembuatan infografis, videografis, dan reels (*short videografis*).
 - b. **Analisis Data:** Memanfaatkan *Google Analytics* sebagai media analisis data untuk mengidentifikasi tren hukum, kebijakan yang paling dicari, dan permintaan yang paling sering dari pengguna JDIH.
 - c. **Kemitraan dengan Pihak Eksternal:** JDIH Marves telah menginisiasi terjalinnya kerja sama antara Kemenko Marves dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran terkait Dukungan Kemitraan Penguatan Layanan Hukum, yang

memungkinkan para pihak untuk saling berkolaborasi melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, *Joint Lecture*, Penguatan Layanan Bantuan Hukum, Publikasi Karya Ilmiah Hukum, Pembangunan Kapasitas SDM, dan lain-lain.

- d. **ITSA (*IT Security Assessment*)**: ITSA (*IT Security Assessment*) oleh BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) pada *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenko Marves. Dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah keamanan siber dan kerentanan dalam sistem aplikasi.

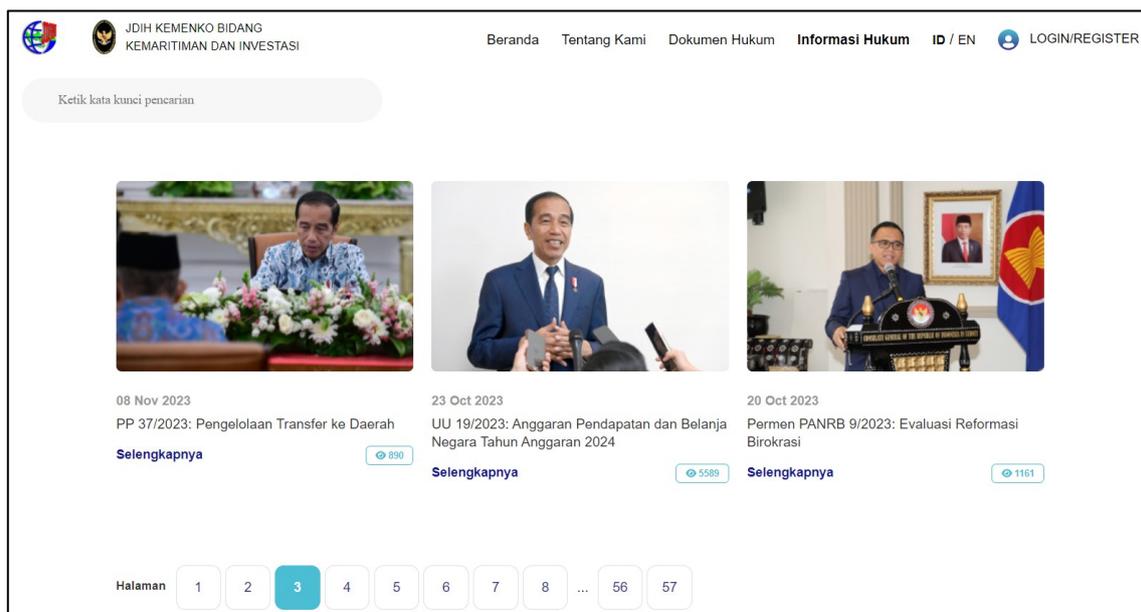
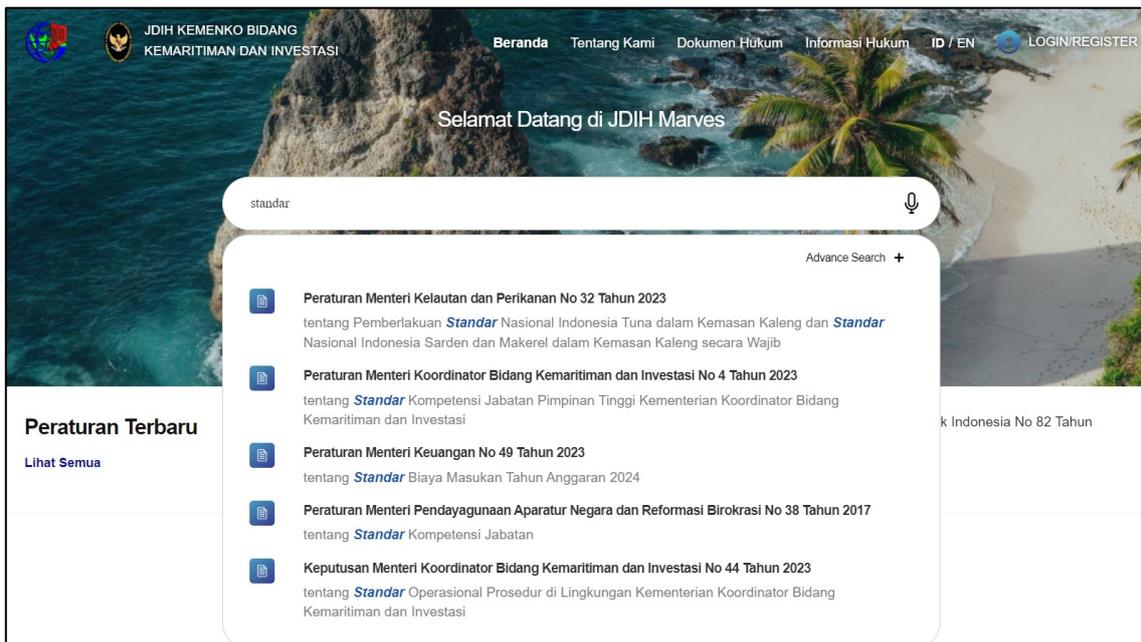
Meskipun didukung oleh hal-hal tersebut di atas, capaian peringkat JDIH belum memenuhi target yang ditentukan. Hal tersebut dikarenakan Kemenko Marves masih dihadapkan oleh **kendala/hambatan** berupa alokasi anggaran pengembangan *website* tidak mendapat persetujuan, sehingga pengelola JDIH Marves tidak bisa melakukan pengembangan atau perbaikan pada *website* JDIH Marves sebagaimana dengan rencana pengembangan yang telah disusun.

Kemenko Marves telah melakukan upaya yaitu bersurat kepada Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional melalui surat terkait Permohonan Tanggapan atas Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2022 dalam Pengembangan JDIH untuk mendapat tanggapan atas kebijakan tersebut. Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional telah menanggapi surat tersebut dengan memberikan tanggapan akan mendukung kegiatan pengembangan, selama hal itu mendukung kualitas pelayanan pengelolaan JDIH.

Inovasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mempertahankan nilai yang ada antara lain:

1. Tampilan halaman awal *website* JDIH Marves telah dilakukan perubahan mengikuti *tren desain website* Tahun 2023
2. *Suggestion Search Engine* Sistem JDIH menampilkan *suggestion/saran* beberapa peraturan sesuai dengan *keyword* yang dimasukkan
3. *Search Engine website* JDIH Marves telah disempurnakan oleh google untuk memudahkan yang dapat menelusuri semua menu di *website* JDIH Marves sehingga pencarian tidak hanya menyediakan informasi peraturan.
4. Pencarian (*search engine*) JDIH Marves dapat menampilkan *suggestion* terhadap *keyword* ketika *user* salah ketik.
5. Pencarian (*search engine*) JDIH Marves dapat membaca hingga *file pdf*
6. Pencarian (*search engine*) JDIH Marves dapat membaca tulisan pada gambar
7. Pencarian (*search engine*) JDIH Marves saat ini dapat menggunakan *voice recognition*
8. Taskbar pencarian akan mengikuti ketika *user* berselancar agar memudahkan ketika ingin melakukan pencarian baru
9. Integrasi media sosial Instagram kedalam *website* JDIH Marves agar memperluas jangkauan konten agar terpublikasi dengan baik
10. Terdapat fitur *lock document* untuk menjaga dokumen yang bersifat rahasia, pencari informasi di arahkan untuk menghubungi pengelola website di menu hubungi kami untuk memperoleh dokumen tersebut
11. Mengkoordinasikan dan memberikan penghargaan kepada anggota JDIH pada 7 K/L yang dikoordinasikan Kemenko Marves
12. Informasi peraturan yang terkait Kemenko Marves diolah dalam bentuk artikel berita hukum yang bertujuan memudahkan untuk memperoleh informasi hukum yang menarik

minat masyarakat akan sebuah peraturan terbaru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.



Gambar 4 Contoh hasil inovasi website JDih

Rencana tindak lanjut tahun 2024 adalah JDih Kemenko Marves akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Evaluasi Pusat JDih dan Penyampaian Rencana Kerja Tahun 2024. Selain itu, JDih Kemenko Marves juga akan melaksanakan *Security Assessment* melalui Tim *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* yang telah terbentuk di Biro Komunikasi untuk dapat meminimalisir adanya kerentanan dan ancaman siber terhadap website JDih Kemenko Marves.

IKU 9. Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Nilai KIP merupakan penilaian keterbukaan informasi publik Kemenko Marves dari Komisi Informasi Pusat. Hasil monitoring dan evaluasi terdiri dari tujuh kategori Badan Publik

yang telah dikualifikasikan berdasarkan tolok ukur yang dihasilkan dari setiap tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.

IKU ini baru ditargetkan pada perjanjian kinerja tahun 2023, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun 2022 dan tidak memiliki target di tahun akhir renstra 2024. Rincian digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 24 Perbandingan Capaian dan Target IKU 9

No	Nama IKU	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target RPJMN/Nasional
9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	N/A	93,33	97,3	N/A	-

Hasil evaluasi yang diterima oleh Kemenko Marves, senilai 93,33 memiliki kualifikasi **Informatif** (rentang 90 sampai 100). Pengumuman nilai hasil evaluasi dilakukan melalui Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik. Evaluasi ini dilakukan dengan menilai 6 komponen indikator, yaitu sarana prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi, serta digitalisasi.

Pencapaian IKU ini **didukung oleh** adanya kebijakan dalam mendukung kegiatan meningkatkan Nilai KIP Kemenko Marves berupa Permenko Nomor 10 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenko Marves. Beberapa hal yang juga telah dilakukan dalam rangka meningkatkan hasil evaluasi yakni:

1. Menyusun Daftar Informasi Publik bersama PPID dan PPID Unit Kerja secara berkala.
2. Menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan melalui prosedur uji konsekuensi.

Meskipun telah bernilai informatif, Setmenko Marves dihadapkan oleh **kendala** sehingga target yang ditentukan belum tercapai, diantaranya:

1. Perubahan variabel penilaian KIP;
2. Pergantian komisioner di instansi penilai;
3. Presentasi dari pimpinan tinggi (untuk menambah nilai);
4. Kemenko Marves belum dapat memenuhi beberapa *evidence* untuk mengisi Lembar Kerja Elektronik/Kuisisioner Monitoring dan Evaluasi yang disampaikan Komisi Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan Kepala Biro Komunikasi selaku PPID. Evidence-evidence tersebut sebagai berikut:
 - a. Dokumen pengadaan barang dan jasa yang terdaftar di LPSE serta beberapa dokumen yang terkait pengadaan barang dan jasa tidak dapat dipenuhi karena proses lelang belum selesai.
 - b. Sertifikat atau lisensi terkait kekayaan intelektual tidak dapat dipenuhi karena Kemenko Marves belum pernah mendaftarkan kekayaan intelektual ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - c. Dokumen Studi Kelayakan AMDAL pada dokumen lelang tidak dapat dipenuhi karena lelang di Kemenko Marves tidak ada yang mensyaratkan dokumen AMDAL.
 - d. Dokumen pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas internal dan laporan penindakan tidak dapat dipenuhi karena pengawas internal menganggap dokumen tersebut bersifat rahasia.

Succes story Setmenko Marves dalam pencapaian IKU yakni telah diterimanya predikat keterbukaan informasi publik informatif dengan rentang skor >90 – 100 dan plakat lembaga informatif sebagai bentuk apresiasi. Maka dari itu **Rencana tindak lanjut 2024** yakni akan diberlakukan pergantian IKU menjadi Predikat Keterbukaan Informasi Publik.

3.2 Realisasi Anggaran

Penggunaan anggaran Tahun 2023 Setmenko Marves berdasarkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) adalah sebagai berikut.

Tabel 25 Realisasi Anggaran Lingkup Setmenko Marves Tahun 2023

Deskripsi	Pagu	Realisasi		Sisa
		Rp	%	
Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi	341.990.713.000	338.940.911.013	99,11%	3.049.801.987
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi	182.302.379.000	179.658.501.268	98,55%	2.643.877.732
Biro Umum	138.510.325.000	135.891.177.632	98,11%	2.619.147.368
Biro Perencanaan	7.715.498.000	7.714.678.761	99,99%	819.239
Biro Hukum	5.592.177.000	5.591.890.023	99,99%	286.977
Biro Komunikasi	25.214.918.000	25.195.795.973	99,92%	19.122.027
Staf Ahli Menteri	1.877.358.000	1.872.871.889	99,76%	4.486.111
Inspektorat	3.392.103.000	3.392.086.990	100,00%	16.010

Keterangan: Realisasi per 31 Desember 2023

Anggaran Setmenko Tahun 2023 telah terealisasi sebesar 98,55% sebagaimana pada Tabel di atas. Realisasi anggaran tertinggi adalah Inspektorat yakni sebesar 100%. Sedangkan realisasi anggaran terendah terdapat pada Biro Umum (98,11%).

3.3 Analisis Sumber Daya

3.3.1 Analisis Sumber Daya Anggaran

A. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima

Sasaran strategis 1 (SS.1) ini dijabarkan melalui 6 IKU yakni, IKU Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi; IKU Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN); IKU Opini BPK atas Laporan Keuangan; IKU Nilai SPIP Terintegrasi; IKU Nilai Kinerja Anggaran; dan IKU Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

1. IKU Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi

Pencapaian IKU didukung oleh kegiatan Perencanaan Program dan Kegiatan, Pengelolaan Data Kinerja, dan Pengelolaan Laporan Kinerja. Jumlah Pagu pada IKU ini sebesar Rp2.012.735.000. Realisasi atas pencapaian IKU sebagai berikut.

Tabel 26 Realisasi IKU 1

No	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian IKU	Efisiensi Anggaran

1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp2.012.735.000	Rp2.012.470.739	90,24%	0,0130%
---	---	-----------------	-----------------	--------	---------

Dengan efisiensi anggaran sebesar Rp264.261 atau sebesar 0,013%, IKU 1 memiliki capaian kinerja 90,24%.

2. IKU Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pencapaian IKU didukung oleh kegiatan Layanan Manajemen SDM Internal. Jumlah Pagu pada IKU ini sebesar Rp6.335.946.000. Realisasi atas pencapaian IKU sebagai berikut.

Tabel 27 Realisasi IKU 2

No	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian IKU	Efisiensi Anggaran
2	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Rp6.335.946.000	Rp6.334.715.682	120%	0,0190%

Dengan efisiensi anggaran sebesar Rp1.230.318 atau sebesar 0,019%, IKU 2 memiliki capaian kinerja 120%.

3. IKU Opini BPK atas Laporan Keuangan

Pencapaian IKU didukung oleh kegiatan Layanan Manajemen Keuangan dan Layanan Audit Internal. Jumlah Pagu pada IKU ini sebesar Rp4.802.276.000. Realisasi atas pencapaian IKU sebagai berikut.

Tabel 28 Realisasi IKU 3

No	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian IKU	Efisiensi Anggaran
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Rp4.802.276.000	Rp4.801.986.931	100%	0,0060%

Dengan efisiensi anggaran sebesar Rp289.069 atau sebesar 0,006%, IKU 3 memiliki capaian kinerja 100%.

4. IKU Nilai SPIP Terintegrasi

Pencapaian iKU didukung oleh kegiatan Layanan Audit Internal. Jumlah Pagu pada IKU ini sebesar Rp2.802.276.000. Realisasi atas pencapaian IKU sebagai berikut.

Tabel 29 Realisasi IKU 4

No	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian IKU	Efisiensi Anggaran
4	Nilai SPIP Terintegrasi	Rp2.802.276.000	Rp2.802.268.827	100%	0,0002%

Dengan efisiensi anggaran sebesar Rp7.173 atau sebesar 0,0002%, IKU 4 memiliki capaian kinerja 100%.

5. IKU Nilai Kinerja Anggaran

Pencapaian IKU didukung oleh kegiatan Perencanaan Anggaran dan Layanan Manajemen Keuangan. Jumlah Pagu pada IKU ini sebesar Rp2.761.905.000. Realisasi atas pencapaian IKU sebagai berikut.

Tabel 30 Realisasi IKU 5

No	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian IKU	Efisiensi Anggaran
5	Nilai Kinerja Anggaran	Rp2.761.905.000	Rp2.761.621.204	100,09%	0,0100%

Dengan efisiensi anggaran sebesar Rp283.796 atau sebesar 0,01%, IKU 5 memiliki capaian kinerja 100,09%.

6. IKU Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pencapaian IKU didukung oleh kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dan Data dan Informasi Publik. Jumlah Pagu pada IKU ini sebesar Rp5.755.019.000. Realisasi atas pencapaian IKU sebagai berikut.

Tabel 31 Realisasi IKU 6

No	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian IKU	Efisiensi Anggaran
6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Rp5.755.019.000	Rp5.748.522.007	104,40%	0,1128%

Dengan efisiensi anggaran sebesar Rp6.496.993 atau sebesar 0,1128%, IKU 6 memiliki capaian kinerja 104,40%.

B. Sasaran Strategis 2

SS 2 ini dijabarkan melalui 3 IKU yakni: IKU Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); IKU Peringkat JDIH Nasional; dan IKU Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

1. IKU Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pencapaian IKU didukung oleh kegiatan Data dan Informasi Publik, Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jumlah Pagu pada IKU ini sebesar Rp2.183.959.000. Realisasi atas pencapaian IKU sebagai berikut.

Tabel 32 Realisasi IKU 7

No	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian IKU	Efisiensi Anggaran
7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Rp2.183.959.000	Rp2.174.209.353	103,44%	0,4460%

Dengan efisiensi anggaran sebesar Rp9.749.647 atau sebesar 0,446%, IKU 7 memiliki capaian kinerja 103,44%.

2. IKU Peringkat JDIH Nasional

Pencapaian IKU didukung oleh kegiatan Layanan Hukum dan Data dan Informasi Publik. Jumlah Pagu pada IKU ini sebesar Rp5.377.077.000. Realisasi atas pencapaian IKU sebagai berikut.

Tabel 33 Realisasi IKU 8

No	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian IKU	Efisiensi Anggaran
8	Peringkat JDIH Nasional	Rp5.377.077.000	Rp5.373.441.739	98%	0,0670%

Dengan efisiensi anggaran sebesar Rp3.635.261 atau sebesar 0,067%, IKU 8 memiliki capaian kinerja 98%.

3. IKU Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Pencapaian IKU didukung oleh kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dan Data dan Informasi Publik. Jumlah Pagu pada IKU ini sebesar Rp5.755.019.000. Realisasi atas pencapaian IKU sebagai berikut.

Tabel 34 Realisasi IKU 9

No	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian IKU	Efisiensi Anggaran
9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Rp5.755.019.000	Rp5.748.522.007	95,92%	0,1120%

Dengan efisiensi anggaran sebesar Rp6.496.993 atau sebesar 0,112%, IKU 9 memiliki capaian kinerja 95,92%.

3.3.2 Analisis Sumber Daya Manusia

Dari keseluruhan Pejabat Tinggi Pratama, terdapat 4 (empat) pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat I. Sebanyak 18 (delapan belas) pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat II, dan 8 (delapan) pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator. Dari total 2 (dua) pejabat administrator, 2 (dua) pejabat telah mengikuti pelatihan administrator (Pim Tk. III) dan 2 (dua) pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas (Pim Tk. IV). Sedangkan dari total 4 (empat) pejabat pengawas, belum ada pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator (Pim Tk.III) dan belum ada pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas (Pim Tk. IV). Adapun data pegawai Setmenko Marves seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 35 Data Pegawai Berdasarkan Gender

Gender	JPT Non ASN	PNS	CPNS	JUMLAH
Laki-Laki	4	279	-	281
Perempuan	-	192	-	192

Tabel 36 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	JPT Non ASN	PNS	CPNS	JUMLAH
D-III	-	24	-	24
D-IV	-	21	-	21
S1	-	245	-	245
S2	4	160	-	164
S3	-	20	-	20
SLTA	-	1	-	1

Tabel 37 Data Pegawai Berdasarkan Usia

Usia	JPT Non ASN	PNS	CPNS	JUMLAH
20-29	-	159	-	159
30-39	2	143	-	145
40-49	2	92	-	94
50-59	-	77	-	77

Tabel 38 Data Pegawai Berdasarkan Pangkat

Pangkat/ Gol. Ruang	PNS	CPNS	JUMLAH
Pembina Utama, IV/e	1	-	1
Pembina Utama Madya, IV/d	13	-	13
Pembina Utama Muda, IV/c	20	-	20
Pembina Tk. I, IV/b	50	-	50
Pembina, IV/a	49	-	49
Penata Tk. I, III/d	39	-	39
Penata, III/c	17	-	17
Penata Muda Tk. I, III/b	114	-	114
Penata Muda, III/a	146	-	146
Pengatur Tk. I, II/d	9	-	9
Pengatur, II/c	13	-	13

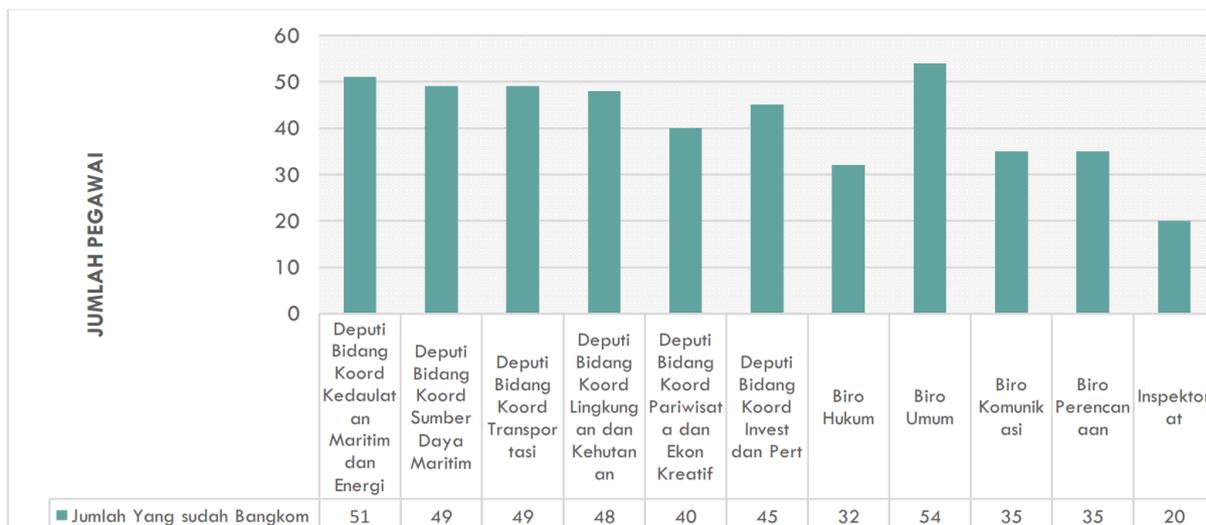
Tabel 39 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	JPT Non ASN	PNS	CPNS	JUMLAH
Pelaksana	-	215	-	215
Fungsional	-	209	-	209
Eselon IV.a	-	4	-	4
Eselon III.a	-	2	-	2
Eselon II.a	-	34	-	34
Eselon I.b	-	2	-	2
Eselon I.a	4	4	-	8

Tabel 40 Data Pegawai Berdasarkan Unit Kerja lingkup Setmenko Marves

Unit Kerja	JPT ASN	JPT Non ASN	PNS	CPNS	JUMLAH
Sekretariat Kemenko	1	-	-	-	1
Biro Perencanaan	1	-	34	-	35
Biro Hukum	1	-	32	-	33
Biro Umum	-	-	43	-	44
Biro Komunikasi	1	-	34	-	35
Inspektorat	1	-	21	-	22

Adapun jumlah pegawai yang sudah mengikuti diklat fungsional sejumlah 97 (sembilan puluh tujuh) pegawai. Selanjutnya, jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan teknis, *short course*, *IELTS Preparation Course*, bimbingan teknis, *workshop*, sosialisasi serta seminar baik secara daring ataupun luring yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian/Lembaga lain serta lembaga swasta tercatat sebanyak 458 PNS dari total keseluruhan 473 PNS. Data tersebut digambarkan pada tabel dan grafik di bawah ini:



Grafik 3 Data Pegawai yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi

Tabel 41 Data Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Fungsional

Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Yang Sudah Diklat
Analisis Anggaran	0
Analisis Hukum	0
Analisis Kebijakan	50
Analisis Kepegawaian	3
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	6
Analisis SDM Aparatur	0
Arsiparis	9
Auditor	13
Pengelola PBJ	2
Perancang PUU	1
Perencanaan	7
Pranata Humas	4
Pranata Komputer	2
Total sudah diklat	97

3.3.3 Implementasi Aplikasi

Beberapa aplikasi yang diimplementasikan di lingkungan Setmenko Marves yakni SIK-MARVES (e-SAKIP MARVES), Marves Core, Marves HR, MARVES Dalam Angka, JDIH (Jaringan Dokumen Informasi Hukum) Kemenko Marves. Adapun efisiensi yang telah dirasakan dengan adanya implementasi beberapa aplikasi tersebut di antaranya:

1. Pengembangan Marves Core dilaksanakan untuk menunjang budaya *digital workplace* di Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi melalui keseragaman proses, sentralisasi penyimpanan data, dan nantinya dapat dilakukan analisis terhadap data. Hal ini tentunya dapat menimbulkan efisiensi baik dari proses

maupun biaya pengembangan digital *platform* di Unit Eselon I dalam hal duplikasi aplikasi.

Selain bersifat digitalisasi, Marves Core juga dikembangkan dengan prinsip simplifikasi proses bisnis, sehingga dapat menyederhanakan birokrasi serta mempercepat proses dan waktu penyelesaian tugas. Sebagai contoh, integrasi antara presensi kehadiran dengan dengan pengukuran kinerja pegawai. Selain itu, akan mempermudah pelaporan dan pengisian *logbook* dikarenakan perekaman tugas secara otomatis setiap harinya.

2. Efisiensi waktu pelaksanaan tugas dan fungsi. Penggunaan modul Marves HR yang dapat diakses kapan saja sangat membantu proses pelaksanaan tugas dan fungsi data kepegawaian. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang sebelumnya hanya dapat dilakukan ketika seorang pejabat/pegawai berada di kantor, sekarang dapat dilakukan kapan saja bahkan ketika seorang pejabat/pegawai tersebut sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor.
3. SIK-MARVES kembali mengembangkan pada modul Fase II menjadi e-SAKIP MARVES, hal ini dilakukan sebagai implementasi dalam mengintegrasikan aplikasi dari mulai perencanaan - pengukuran kinerja – pelaporan kinerja.
4. Marves Dalam Angka merupakan penyajian data sektoral pada kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Marves yang dinamis.
5. Sistem JDIH telah memfasilitasi layanan hukum secara keseluruhan dari mulai perancangan, advokasi dan informasi hukum sehingga tidak perlu mengeluarkan kembali anggaran untuk pembangunan sistem sejenis karena sudah terfasilitasi dalam satu layanan di sistem JDIH Marves.
6. E-RB memudahkan dalam pengelolaan bukti dukung RB dan penilaian PMPRB yang digunakan oleh unit kerja, Inspektorat dan KemenpanRB karena berbasis aplikasi yang semula manual menggunakan lembar *excel* dan *google drive*. Selain itu berpengaruh pula terhadap efisiensi anggaran, karena proses penyiapan bukti dukung lebih efektif dan hanya memerlukan sekali pertemuan untuk pleno.

Selain implementasi Aplikasi yang dibuat oleh Internal Kemenko Marves, dalam pelaksanaan tugas Kemenko Marves juga menggunakan beberapa aplikasi dari eksternal, seperti SRIKANDI, SAKTI, E-Monev BAPPENAS, KRISNA, dan SMART DJA yang sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi kinerja.

3.3.4 Konsolidasi Perangkat Infrastruktur TIK dan Perangkat Pengguna

Pada tahun 2023, Biro Komunikasi sebagai Unit TIK Pusat telah melaksanakan program konsolidasi perangkat infrastruktur TIK Kemenko Marves (*server, storage, jaringan, dan lain-lain untuk common application*) dan perangkat pengguna Kemenko Marves (*Personal Computer dan tablet*). Namun, karena adanya peraturan terbaru (Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional), sehingga Kemenko Marves melakukan penyesuaian regulasi yang baru.

Seluruh kebutuhan infrastruktur TIK serta perangkat pengguna pada unit eselon I dikonsolidasikan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Dengan adanya konsolidasi ini diharapkan unit eselon I dapat berfokus

dalam pengembangan aplikasi utama (*core application*) dan tidak lagi menganggarkan kebutuhan belanja infrastruktur TIK atas *common application* dan perangkat pengguna. Kebutuhan dimaksud disampaikan secara berjenjang melalui Unit TIK masing-masing unit Eselon I, untuk selanjutnya diusulkan ke unit TIK Pusat.

Melalui konsolidasi ini juga dapat menghilangkan adanya kemungkinan redundansi penganggaran belanja TIK serta menghilangkan *idle capacity* infrastruktur TIK karena hasil pengadaan dapat digunakan oleh seluruh unit eselon I (*sharing resource*). Selain itu, konsolidasi juga memungkinkan terciptanya standarisasi spesifikasi dan harga perangkat. Jika pengadaan diadakan oleh masing-masing unit eselon I secara mandiri, dapat mengakibatkan keberagaman harga untuk satu perangkat TIK yang sama dan dapat berpotensi menjadi temuan auditor.

Hal lain yang menjadi manfaat konsolidasi adalah memungkinkan terciptanya *economies of scale* dikarenakan kapasitas infrastruktur TIK yang dikonsolidasikan cukup besar dan terjadi penghematan biaya karena pembelian yang dilakukan dalam jumlah besar. Dari sisi pengadaan, adanya konsolidasi menghemat sumber daya waktu dan manusia, untuk pengelolaan infrastruktur TIK dan lisensi-lisensi yang digunakan untuk operasional TIK di Kemenko Marves proses pengadaan diadakan secara terpusat yang langsung di kelola Biro Komunikasi.

Berikut ini merupakan data anggaran belanja TIK tahun 2023 per unit kerja eselon II lingkup Setmenko Marves:

Tabel 42 Anggaran Belanja TIK Unit Kerja Setmenko Marves Tahun 2023

No.	Unit Eselon I	Anggaran Belanja TIK (Rp.)
1	Sekretariat Kemenko	-
2	Biro Perencanaan	-
3	Biro Hukum	-
4	Biro Umum	-
5	Biro Komunikasi	Rp 115.000.000,00
6	Inspektorat	-
Total		Rp 115.000.000,00

Sumber: Biro Komunikasi Setmenko Marves, 2023

3.3.5 Efisiensi Anggaran

Perencanaan dan penganggaran TA 2023 juga ditandai dengan upaya penyempurnaan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dalam sistem penganggaran melalui redesain sistem penganggaran. Hasil evaluasi selama ini menuntut untuk dilakukan perubahan dan perbaikan guna mewujudkan penerapan konsep *money follow program*.

Melalui proses redesain sistem penganggaran ini, telah dilakukan reviu atas program-program dalam struktur anggaran *existing*. Restrukturisasi program dilakukan melalui identifikasi tugas dan fungsi utama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Unit-unit eselon I yang menjalankan tugas dan fungsi sejenis digabung menjadi satu untuk menjalankan satu Program. Dengan restrukturisasi ini, jumlah Program hasil redesain akan menjadi lebih sedikit, namun lebih fokus dan lebih mencerminkan program-program riil yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Tahun 2023, Setmenko Marves melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp2.643.877.732,00 (1,45%) dari pagu anggaran sebesar Rp182.302.379.000,00. Adapun realisasi anggaran mencapai 98,55% atau sebesar Rp179.658.501.268,00.

Adapun efisiensi dari masing-masing unit kerja lingkup Setmenko Marves sebagai berikut.

1. Biro Perencanaan, efisiensi sebesar Rp819.239,00 (0,001%) dari pagu anggaran sebesar Rp7.715.498.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.714.678.761,00 (99,99%).
2. Biro Hukum, efisiensi sebesar Rp286.977,00 (0,001%) dari pagu anggaran sebesar Rp5.592.177.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.591.890.023,00 (99,99%).
3. Biro Komunikasi, efisiensi sebesar Rp19.122.027,00 (0,08%) dari pagu anggaran sebesar Rp25.214.918.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp25.195.795.973,00 (99,92%).
4. Biro Umum, efisiensi sebesar Rp2.619.147.368,00 (0,89%) dari pagu anggaran sebesar Rp138.510.325.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp135.891.177.632,00 (99,11%).
5. Inspektorat, efisiensi sebesar Rp16.010,00 (0,0001%) dari pagu anggaran sebesar Rp3.392.103.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.392.086.990,00 (99,99%).

3.3.6 Efisiensi Ruang Kerja Melalui Implementasi Konsep ABW

Dalam rangka pelaksanaan penataan ruang kerja berdasarkan konsep *Activity Based Workplace* (ABW) sebagai bagian dari program Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan, program Inisiatif Strategis Kemenko Marves, dan Implementasi program Ruang Kerja Masa Depan, dilakukan asesmen penataan ruang kerja di lingkungan kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi oleh Tim BMN Biro Umum beserta perwakilan unit kerja lingkup Setmenko Marves. Adapun pembagian ruang kerja sebagai berikut:

Tabel 43 Pembagian Ruang Kerja

No	Unit Kerja	Gedung (Lt.)
1.	Setmenko	4 (Utara)
2.	Biro Perencanaan	5 (Utara)
3.	Biro Hukum	5 (Selatan)
4.	Biro Umum	6 (Selatan) dan 21
5.	Biro Komunikasi	6 (Utara)
6.	Inspektorat	17
7.	Ruang PPID	1
8.	Ruang Rapat	2 dan ada disetiap ruang Biro
9.	Klinik	21
10.	Ruang Gym	21
11.	Studio Musik	21
12.	Lobby	GF (dasar)
13.	Parkir Area	Halaman Lingkungan Kantor & Gd. Parkir bersama BRIN

3.3.7 Implementasi Kebijakan SDM

Beberapa tindakan yang dilakukan untuk pertumbuhan pegawai antara lain sebagai berikut:

a. Rekrutmen ASN Tahun Anggaran (TA) 2023

Sebanyak 74 (Tujuh Puluh Empat) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) resmi dilantik menjadi PNS Kemenko Marves. Pelantikan CPNS TA. 2021 menjadi PNS di lingkup Kemenko Marves berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia No. 118 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Redistribusi pegawai merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan SDM melalui optimalisasi jumlah SDM yang telah tersedia di internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Melalui redistribusi pegawai diharapkan alokasi sumber daya khususnya sumber daya manusia dapat lebih tepat, sehingga formasi jabatan yang lowong dapat terisi sesuai kebutuhan organisasi dan aspirasi karier pegawai. Redistribusi pegawai antar unit eselon I dilaksanakan melalui mekanisme *Internal Job Vacancy* dan mutasi/promosi karena penugasan atau atas permintaan sendiri.





4 PENUTUP



BAB IV**PENUTUP****4.1. Kesimpulan**

1. Laporan kinerja Setmenko Marves Tahun 2023 menyajikan secara komprehensif informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan pelaksanaan Renstra Setmenko Marves pada tahun keempat. Laporan ini menyajikan target yang berhasil dicapai dan target yang belum tercapai sesuai target serta kendala dalam pencapaiannya.
2. Capaian kinerja Setmenko Marves Tahun 2023 adalah sebesar 101,34%. Sementara anggaran Setmenko terealisasi sebesar 98,55%.
3. Terdapat 4 IKU yang melampaui target yakni IKU Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), IKU Nilai Kinerja Anggaran, IKU Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan IKU Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
4. Beberapa kendala dalam pencapaian target, baik keuangan maupun kinerja di Setmenko Marves Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

A. Kinerja

- Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dengan jangka pendek belum selaras. Selain itu, *crosscutting* antar eselon 1 dalam pohon kinerja belum dijabarkan secara spesifik.
- Dalam pengukuran, masih terdapat data kinerja yang belum sepenuhnya andal untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Selain itu, aplikasi SIK-Marves saat ini masih dalam proses pengembangan untuk integrasi dengan beberapa aplikasi lainnya.
- Analisis faktor keberhasilan, kendala, rekomendasi, dan tindak lanjut belum terlihat dalam dokumen laporan kinerja unit kerja. Selain itu beberapa data kinerja yang disampaikan belum memenuhi prinsip *reliable*.
- Catatan evaluasi belum disertai dengan rekomendasi yang konkrit, sehingga kualitas laporan hasil evaluasi belum maksimal.

B. Pengembangan SDM

- Terbatasnya jumlah kuota pada setiap penyelenggaraan pelatihan fungsional dan pelatihan kepemimpinan oleh instansi penyelenggara, sehingga beberapa pegawai terutama PNS baru Kemenko Marves belum banyak yang dikutsertakan dalam diklat keahlian (fungsional) sesuai dengan formasi pelamaran pegawai.
- Kemenko Marves belum memiliki Pusdiklat, sehingga masih bergantung pada ketersediaan kuota di lembaga penyelenggara pelatihan.

C. Keuangan dan Asset

- Sistem aplikasi SAKTI dan SMART di Kementerian Keuangan tidak terintegrasi penuh, dimana data belum menggunakan satu *database*.
- Masih ditemukan beberapa aset yang tidak dapat ditelusuri, belum dilabeli Barang Milik Negara, dan terdapat permasalahan dalam pengelolaan persediaan.
- Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis selaku pengelola keuangan, penyusun laporan keuangan, dan ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah.

5. Seluruh dokumen bukti dukung dapat diakses pada tautan:

<https://bit.ly/EVIDENCECLKJSETMENKO2023>.

4.2. Rekomendasi

Untuk perbaikan dimasa mendatang, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Melaksanakan peningkatan kapasitas pegawai untuk mendukung upaya pencapaian kinerja keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan arsip

A. Kinerja

- Melaksanakan bimbingan teknis pelaporan untuk peningkatan kualitas Laporan Kinerja lingkup Setmenko
- Melakukan reviu dokumen perencanaan kinerja.
- Pendampingan dalam penyusunan penjabaran kinerja yang dimulai dengan menyusun pohon kinerja berdasarkan *logical framework* dan menyempurnakan *crosscutting* antar eselon 1.
- Melakukan reviu atas formulasi pengukuran kinerja khususnya untuk indikator yang membutuhkan kolaborasi antar unit/entitas.
- Mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja, baik tingkat unit kerja maupun individu pegawai.
- Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada seluruh unit kerja yang mengacu pada PermenPANRB 53/2014 dengan melengkapi poin-poin analisis capaian kinerja.
- Memastikan data kinerja dalam laporan kinerja *reliable* baik dari hasil perhitungan data kinerja, kualitas data, serta kejelasan sumber data.
- Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi yang sesuai dengan temuan dan permasalahan utama dalam implementasi SAKIP.
- Mendorong hasil evaluasi SAKIP internal untuk dapat memberikan langkah-langkah perbaikan nyata.

B. Peningkatan SDM

- Pemetaan kebutuhan diklat.
- Pemanfaatan seoptimal mungkin anggaran yang tersedia dan menjaga koordinasi yang baik dengan BKN.
- Komunikasi dengan pusdiklat dan memfasilitasi info beasiswa ke seluruh unit.
- Memperbaharui data keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan/bimtek/kursus/seminar yang telah selesai diikuti yang diselenggarakan baik oleh internal maupun eksternal Kemenko Marves ke dalam aplikasi MarvesHR.

C. Keuangan dan Asset

- Memberikan masukan secara tertulis kepada Kemenkeu agar aplikasi dibuat lebih fleksible dan dapat mengakomodir kebutuhan dinamika perencanaan
- Melakukan integrasi aplikasi penuh dengan menggunakan satu *database*
- Inventarisasi aset agar semua aset dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan aset.
- Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi teknis dalam pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Mempersiapkan standar dan prosedur untuk meningkatkan tata kelola keuangan.
- Memaksimalkan penggunaan aplikasi SAKTI mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan.

LAMPIRAN

Lampiran I. Perjanjian Kinerja Setmenko Marves Tahun 2023



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ayodhia G. L. Kalake
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Luhut B. Pandjaitan
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2023

PIHAK KEDUA,

Luhut B. Pandjaitan

PIHAK PERTAMA,

Ayodhia G. L. Kalake

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

TARGET KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
SS.1	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	80
		2	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	60
		3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		4	Nilai SPIP Terintegrasi	>3
		5	Nilai Kinerja Anggaran	93
		6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4,3
SS.2	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Elektronik	7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,2
		8	Peringkat JDIH Nasional	1
		9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	97,3

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program dan Anggaran, Dukungan Kebijakan Strategis, Layanan Persidangan dan Akuntabilitas Kinerja	Rp8.288.898.000
2	Pengelolaan Layanan Hukum, Advokasi, Kerja Sama dan Organisasi	Rp6.000.000.000
3	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Rp147.577.964.000
4	Penyelenggaraan Layanan Komunikasi	Rp22.810.000.000
5	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp3.500.000.000
6	Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman Nasional	Rp1.600.000.000
JUMLAH ANGGARAN		Rp189.776.862.000

Jakarta, Februari 2023

Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi RI



Luhut B. Pandjaitan

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi



Ayodhia G. L. Kalake

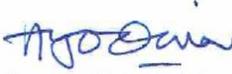
**LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

**RINCIAN DATA KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

NO	INDIKATOR KINERJA	JUDUL KINERJA/HASIL KINERJA	TARGET TAHUNAN	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				I	II	III	IV
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Nilai Hasil Evaluasi Internal KemenPAN Reformasi Birokrasi Terhadap Pelaksanaan SAKIP di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	80		√		
2	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Evaluasi Perseorangan, Hasil Dirata-Rata, Profesional Diukur Sesuai Perka BKN	60			√	
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Pernyataan atau Pendapat Profesional BPK yang Merupakan Kesimpulan Pemeriksa Mengenai Tingkat Kewajaran Informasi yang Disajikan dalam Laporan Keuangan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi	WTP			√	
4	Nilai SPIP Terintegrasi	Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP di Kemenko Marves dalam Mencapai Tujuan Pengendalian	>3				√
5	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2023	93		√		
6	Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik atau IPP Adalah Indeks yang Digunakan Untuk Mengukur Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia Berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.	4,3			√	
7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai yang Didapatkan dari Hasil Penilaian KemenPAN & RB Terhadap Tingkat Kematangan Pelaksanaan SPBE Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan Cakupan Evaluasi Meliputi Domain Kebijakan Internal, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE.	3,2	√			

NO	INDIKATOR KINERJA	JUDUL KINERJA/HASIL KINERJA	TARGET TAHUNAN	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				I	II	III	IV
8	Peringkat JDIH Nasional	Peringkat/Penilaian yang Diberikan Kemenkumham kepada Kemenko Marves dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Nasional	1				✓
9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kemenko Marves Tahun 2022 dari Komisi Informasi Pusat	97,3				✓

Jakarta, Februari 2023
 Sekretaris Kementerian Koordinator
 Bidang Kemaritiman dan Investasi



Ayodhia G. L. Kalake